

**LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL**

REPUBLIK INDONESIA



**MEMINIMALISASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS GUNA
TERWUJUDNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI
DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI**

Oleh :

Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E.

Brigadir Jenderal TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "***Meminimalisasi Dampak Negatif Politik Identitas guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI.***"

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Marsekal Muda TNI Andi Heru dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Om Santi santi santi Om, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Jakarta, 29 Agustus 2023

Penulis

Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E.
Brigadir Jenderal TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E.
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Staf Khusus KASAD
Instansi : TNI AD
Alamat : Jalan Veteran No. 71 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.


Jakarta, 29 Agustus 2023
Penulis

Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E.
Brigadir Jenderal TNI

**MEMINIMALISASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS GUNA
TERWUJUDNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI
DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	9
5. Metode dan Pendekatan	10
6. Pengertian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	13
8. Peraturan Perundang-undangan	14
9. Kerangka Teoritis	15
10. Data dan Fakta	19
11. Lingkungan Strategis	25
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	37

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Politik Identitas saat ini	38
14. Dampak negatif dari Politik Identitas terhadap Konsolidasi Demokrasi saat ini yang cenderung menggoyahkan keutuhan NKRI.....	50
15. Strategi dan Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk Meminimalisir Dampak Negatif dari Politik Identitas guna mewujudkan Konsolidasi Demokrasi sehingga dapat memperkuat keutuhan NKRI.....	60

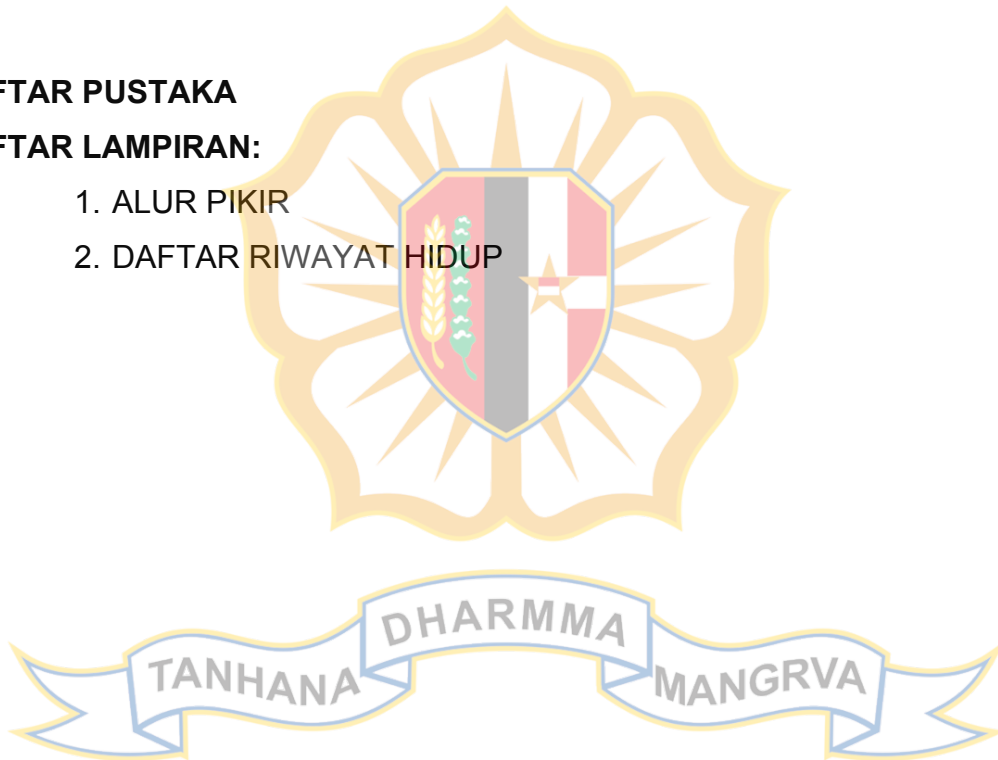
BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	76
17. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TABEL

Tabel 1. Laporan Survei Pemilih Pemuda.

Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia 2010 – 2021.

Tabel 3. Kondisi Intoleransi di Indonesia.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Indeks Kerawanan Pemilu 2024.



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945, Pasal 1. Konsep negara kesatuan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi secara politik, baik dalam bentuk pemerintahan maupun wilayah. Proses terbentuknya NKRI memang melalui perjalanan panjang yang melibatkan perjuangan dan konsensus dari para pendiri bangsa. Sebagai contoh, perjuangan melawan penjajah dan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal terbentuknya NKRI. Selanjutnya, melalui proses perumusan UUD NRI 1945 dan pembentukan lembaga-lembaga negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi menjadi landasan negara Indonesia. Penting untuk diingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan, dengan mengutamakan nilai-nilai nasional, seperti Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu), Pancasila, dan semangat gotong royong. Prinsip ini menjadi landasan dalam membangun keutuhan negara dan mencapai tujuan bersama. Seiring berjalannya waktu, Negara Kesatuan Republik Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dalam bingkai NKRI.

Di Indonesia saat ini, proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung. Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan keberlangsungan demokrasi, baik dalam hal praktik politik, maupun dalam mekanisme pemerintahan. Sebagai negara demokrasi yang relatif muda, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam hal kualitas demokrasi sejak transisi menuju demokrasi pada tahun

1998. Konsolidasi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Era reformasi dimaksudkan untuk menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama. Namun fenomena yang berkembang di Indonesia setelah dilakukannya amandemen keempat UUD NRI tahun 1945 adalah munculnya orientasi yang bias terhadap kebebasan berpolitik dan berekspresi dikalangan para elit politik pada dewasa ini. Hal ini terlihat dari banyaknya para elit politik ditingkat pusat dan daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan popularitas, elektabilitas dan isi tas mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian popularitas adalah kecenderungan untuk dikenal oleh para konstituen dan elektabilitas adalah kecenderungan untuk dipilih oleh para konstituen, sedangkan yang dimaksud dengan isi tas adalah dana atau logistik untuk membeli rekomendasi dari Partai Politik pendukung serta untuk bermain "*money politics*" pada saat pemungutan suara serta persiapan dana apabila nantinya hasil Pilkada tersebut dipermasalahkan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang menjadi indikator terkuat lahirnya politik identitas, yaitu politik yang memanfaatkan identitas suku, agama, ras, atau kelompok lain sebagai basis politik sehingga dapat mempengaruhi soliditas antar sekelompok masyarakat yang merasa lebih eksklusif dari yang lainnya.

Fenomena politik identitas memang telah meluas dan mempengaruhi berbagai aspek sosial politik, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Politik identitas tidak hanya berkaitan dengan isu-isu lokal, tetapi juga telah berubah menjadi isu nasional dan bahkan isu internasional. Secara umum, politik identitas mengacu pada upaya kelompok-kelompok yang memiliki ciri-ciri atau identitas yang sama, seperti agama, suku, atau gender, untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, mempengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan distribusi nilai-nilai yang mereka anggap penting.

Dasar politik identitas telah menjadi faktor yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah bertransisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif setelah puluhan tahun dikuasai oleh rezim otoriter. Namun, dalam konteks ini, politik

identitas muncul sebagai tantangan yang harus dihadapi dalam upaya membangun sistem demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.

Salah satu contoh utama dalam politik identitas Indonesia adalah peran agama dan etnis dalam pilihan politik. Sebagai negara dengan beragam agama dan etnis, perbedaan ini dapat menjadi sumber konflik atau kerjasama politik. Kelompok agama dan etnis seringkali membentuk basis dukungan politik yang kuat, dan para politisi sering memanfaatkan identitas ini untuk memperoleh suara. Namun, hal ini juga dapat memicu polarisasi dan konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Selain itu, masalah politik identitas juga terkait dengan hak-hak minoritas. Demokrasi seharusnya memberikan perlindungan kepada semua warga negara, termasuk minoritas, tetapi masih ada tantangan terkait dengan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh beberapa kelompok. Proses demokrasi di Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua warga negara, termasuk minoritas, dihormati dan diakui.

Meskipun tantangan politik identitas ada, demokrasi di Indonesia juga telah memberikan ruang bagi perdebatan dan pluralisme yang lebih luas. Berbagai kelompok dan komunitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan media serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mempromosikan dialog dan toleransi.

Dalam menghadapi kompleksitas politik identitas, penting untuk mencari keseimbangan antara memahami dan menghormati identitas budaya dan agama sambil mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Proses demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia akan terus menjadi tantangan dan pencapaian yang harus diperjuangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis di negara ini.

Pada tahun 2013, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umumnya dengan mengadopsi Sistem Pemilu Distrik (Single Member District, SMD) sebagai bagian dari reformasi politiknya. Sistem ini dikenal sebagai "Pemilu Distrik" atau "Pemilu SMD" dan merupakan langkah penting dalam mendemokratisasi proses pemilihan umum di Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia menggunakan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka (Open List Proportional Representation) yang melibatkan pemilih

memilih partai politik. Namun, sistem ini memiliki kelemahan seperti kurangnya akuntabilitas langsung antara wakil rakyat dengan pemilih. Dengan adopsi Sistem Pemilu Distrik pada tahun 2013, Indonesia beralih ke pemilihan perorangan, di mana setiap pemilih memilih calon anggota legislatif langsung di distrik pemilihan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas politik dan membuat para anggota legislatif lebih bertanggung jawab kepada konstituennya.

Sistem Pemilu Distrik ini memberikan pemilih lebih banyak kontrol atas siapa yang mereka pilih untuk mewakili mereka di parlemen. Ini juga memungkinkan pemilih untuk lebih fokus pada karakter dan rekam jejak individu calon, yang diharapkan dapat mengurangi praktik politik yang kurang sehat seperti transaksionalisme politik. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti meningkatnya biaya kampanye individu dan risiko pemilih hanya memilih berdasarkan popularitas daripada program atau kebijakan.

Secara keseluruhan, adopsi Sistem Pemilu Distrik pada tahun 2013 adalah langkah penting dalam upaya Indonesia untuk memperkuat demokrasinya dan memberikan warga negara lebih banyak kontrol dalam proses politik. Namun, keberhasilan sistem ini tergantung pada bagaimana pelaksanaannya dilakukan dengan baik, termasuk pengawasan yang ketat dan perlindungan terhadap transparansi dalam politik.

Pada tahun 2014, Indonesia memperkenalkan Presidential Threshold melalui Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Ketentuan ini menetapkan bahwa partai politik atau koalisi partai politik harus memenangkan setidaknya 20% dari suara nasional atau 25% dari kursi DPR Provinsi dalam pemilihan umum legislatif untuk dapat mengajukan kandidat presiden. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah calon presiden yang berasal dari partai kecil atau berbasis di satu provinsi saja, sehingga memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang lebih luas dan dapat memerintah dengan efektif setelah terpilih.

Presidential Threshold, sebagai ketentuan dalam sistem politik Indonesia, telah menimbulkan kontroversi yang mendalam. Beberapa pihak melihatnya sebagai kebijakan yang mendukung partai-partai besar, namun

sebaliknya, menghambat partai-partai kecil untuk bersaing secara adil. Argumen tersebut mencakup ketidaksetaraan akses ke media, sumber daya, dan perolehan suara, faktor-faktor yang membuat partai besar lebih mungkin memenuhi ambang batas ini.

Namun, ada juga pendukung kebijakan ini yang mengklaim bahwa Presidential Threshold bermanfaat dalam mengurangi fragmentasi politik dan mempromosikan stabilitas politik. Mereka berpendapat bahwa aturan ini membantu mencegah terlalu banyaknya partai politik yang bersaing, yang dapat mengakibatkan pemerintahan yang tidak stabil.

Dampak dari Presidential Threshold tidak hanya dirasakan dalam pemilihan presiden, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dalam pemilihan legislatif. Perubahan aturan ini sejalan dengan upaya mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi politik yang inklusif. Oleh karena itu, perdebatan tentang efek positif dan negatifnya terus berlanjut, mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Presiden tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Upaya meningkatkan integritas dan transparansi melalui peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuktikan komitmen terhadap keadilan dalam proses demokrasi. Keberhasilan pemilihan langsung ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan yang damai dan terorganisir.

Kesuksesan ini menjadi landasan kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat adalah cerminan dari upaya pemilihan yang adil dan terbuka. Dengan demikian, pemilihan Presiden tahun 2014 tidak hanya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berkembang tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di negeri ini.

Menurut Cornel West seorang ahli filsafat, aktivis sosial dan pengajar yang lahir pada tahun 1953 di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul "*Race Matters*" yang diterbitkan pada tahun 1993, West menyatakan bahwa rasisme masih menjadi masalah yang serius di Amerika Serikat, walaupun perbedaan rasial dan etnis harus diakui dan dihargai dalam

masyarakat multikultural yang sehat. Dimana ia juga mengkritik kebijakan Pemerintah yang tidak memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kelompok minoritas serta mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan menurut Richard Thomson Ford mengatakan bahwa masalah politik identitas sebenarnya bukan hal yang baru sebab semua politik melibatkan unsur identitas dan semua identitas bersifat politik. Akan tetapi ketika kita menggunakan frasa "politik identitas" (*politics of identity* atau *identity politics*) tentu mengacu pada sesuatu yang lebih spesifik atau bermakna khusus. Politik identitas menunjukkan orientasi politik yang dibangun di sekitar identitas sosial (yang sudah ada sebelumnya). Dengan kata lain, identitas sudah ada pada diri seseorang sebelum masuk ke arena, proses, atau aktivitas politik.

Namun, pandangan Cressida Heyes, di sisi lain, melihat politik identitas sebagai aktivitas politik yang dilakukan oleh kelompok untuk mencapai pembebasan dari situasi marginalisasi. Pembebasan ini terutama berfokus pada anggota kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas melibatkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok serta untuk mengubah dinamika kekuasaan yang terkait dengan identitas kelompok tersebut.

Amy Gutmann memperkenalkan tiga kategori penggunaan identitas dalam politik identitas: "*good*" (baik), "*bad*" (buruk), dan "*ugly*" (jelek). Dalam kategori "*good*" atau baik, politik identitas dapat berkontribusi secara positif dalam membangun solidaritas dan kesadaran publik tentang kewarganegaraan tanpa mempromosikan supremasi kelompok atau kebencian terhadap kelompok lain. Dalam hal ini, politik identitas dapat berfungsi sebagai sarana untuk melawan diskriminasi kelompok dan memperkuat persatuan dalam kerangka demokrasi. Ketika politik identitas didasarkan pada narasi yang menekankan perbedaan primordial atau rasial dalam konteks politik, hal ini dapat menjadi berbahaya, terutama jika narasi tersebut melegitimasi kekerasan.

Penggunaan retorika politik yang menggunakan label negatif berdasarkan agama atau ras, serta menggambarkan pertarungan politik sebagai perang agama, adalah contoh praktik politik identitas yang berbahaya.

Dalam konteks ini, politik identitas dapat memecah belah masyarakat, memicu konflik antar kelompok, dan merusak dinamika demokrasi. Pemahaman ini memang penting dalam melihat dampak politik identitas terhadap dinamika demokrasi. Penting untuk mempromosikan politik identitas yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan dalam masyarakat, sambil menghindari promosi supremasi kelompok dan diskriminasi yang merugikan kelompok lain. Berikut beberapa dampak negatif yang mengarah kepada konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dari berkembangnya Politik identitas dalam demokarasi, antara lain:

- a. Pemecah-belah masyarakat: Politik identitas yang berfokus pada perbedaan antar kelompok bisa memperkuat perasaan "kita versus mereka" di masyarakat. Hal ini dapat memecah-belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan konflik, mengabaikan persatuan dan kerjasama dalam mencapai kepentingan bersama.
- b. Konflik etnis dan agama: Ketika politik identitas berpusat pada etnis atau agama tertentu, bisa meningkatkan risiko konflik antar kelompok. Persaingan politik yang didasarkan pada identitas etnis atau agama dapat memicu ketegangan, intoleransi, dan bahkan kekerasan, yang dapat merusak kerukunan sosial.
- c. Pengabaian isu-isu substansial: Fokus pada politik identitas dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan korupsi. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan nasional dan mengurangi kualitas kehidupan masyarakat.
- d. Manipulasi politik: Politik identitas dapat dimanfaatkan oleh faktor politik untuk memperoleh dukungan politik dengan memanipulasi emosi dan sentimen kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya polarisasi politik yang lebih dalam, yang pada gilirannya dapat melemahkan stabilitas politik dan demokrasi.
- e. Mempertajam ketimpangan: Fokus pada politik identitas dapat mengabaikan isu-isu kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih luas. Ketika politik identitas mendominasi, upaya untuk mengatasi

ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi kurang terfokus, sehingga meningkatkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa politik identitas itu sendiri bukanlah hal yang sepenuhnya negatif. Pengakuan terhadap identitas kelompok yang beragam penting untuk mempromosikan inklusifitas dan keadilan. Namun, jika politik identitas digunakan secara eksklusif atau eksploitatif untuk memperoleh kekuasaan politik atau memecah belah masyarakat, maka dapat memiliki dampak negatif pada demokrasi di Indonesia. Oleh karena diperlukan langkah-langkah strategis dalam meminimalisir dampak negatif dari berkembangnya politik identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah ***Bagaimana Meminimalisasi Dampak Negatif Politik Identitas guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI.***

Untuk menjawab dan menemukan solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah, maka pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam Taskap ini antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik identitas saat ini?
- b. Bagaimana dampak negatif dari politik identitas terhadap konsolidasi demokrasi saat ini yang cenderung menggoyahkan keutuhan NKRI?
- c. Strategi dan upaya apa sajakah yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari politik identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi sehingga dapat memperkuat keutuhan NKRI?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana Meminimalisasi Dampak Negatif Politik Identitas Guna

Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI, kemudian dapat memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan data-data dan fakta yang terjadi.

b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan saran peserta kepada para pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan terkait Meminimalisasi Dampak Negatif Politik Identitas Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini, agar rumusannya lebih jelas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada dampak negatif dari berkembangnya politik Identitas serta upaya-upaya guna meminimalisir dampak negatif politik identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi sehingga dapat berguna dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Politik identitas dan konsolidasi demokrasi yang menjadi pokok bahasan adalah dampak berkembangnya politik identitas di tengah-tengah isu politik yang membawa identitas suku bangsa dan benuansa agama.

b. Sistematika

Uraian pembahasan dan analisa terhadap permasalahan dalam penulisan Taskap. Adapun tata urutan Taskap ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang pokok permasalahan, perumusan masalah, maksud serta tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika/tata tulis dalam penulisan, metode serta pendekatan yang akan digunakan dan beberapa pengertian yang digunakan dalam penulisan Taskap untuk menyamakan persepsi guna memahami pembahasan berdasarkan berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II Landasan Pemikiran. Bab kedua menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk keperluan pembahasan pada bab-bab selanjutnya, meliputi peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta yang berhubungan erat dengan pembahasan, serta faktor-faktor perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan analisis setiap pokok-pokok bahasan dengan menggunakan bahasan yang telah diuraikan pada bab Landasan Pemikiran. Pokok-pokok kajian yang dibahas antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Politik Identitas saat ini, dampak negatif dari politik identitas terhadap konsolidasi demokrasi saat ini yang cenderung menggoyahkan keutuhan NKRI dan strategi dan upaya apa sajakah yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari politik identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi sehingga dapat memperkokoh keutuhan NKRI.

Bab IV Penutup. Pada bagian terakhir diuraikan simpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan dengan solusi untuk masing-masing pokok pembahasan. Kemudian juga dikemukakan rekomendasi yang berisikan saran masukan pada pembahasan Taskap ini.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang akan diimplementasikan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini adalah:

- 1) Pengumpulan data serta fakta berdasarkan metode penelitian literatur berupa data sekunder. Pengumpulan data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik yang berupa buku, jurnal penelitian, maupun laporan hasil penelitian pihak lain.
- 2) Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan studi literatur dengan pendekatan perspektif Ketahanan Nasional secara kesisteman yang komprehensif, integral dan holistik.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap menggunakan pendekatan pandangan kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu yang sesuai dengan kerangka teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan.

6. Pengertian

Berikut adalah daftar pengertian kata dan istilah yang digunakan dalam Taskap ini:

- a. **Politik Identitas.** adalah fenomena di mana individu atau kelompok menggunakan identitas mereka, seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang budaya, sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam politik dan memperjuangkan kepentingan mereka.¹
- b. **Demokrasi.** Menurut pandangan C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas penduduk yang dewasa terlibat dalam politik melalui representasi.² Dalam sistem perwakilan, wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik dan bertindak atas nama masyarakat yang mereka wakili.
- c. **Konsolidasi Politik.** Larry Diamond menggambarkan konsolidasi politik sebagai proses di mana demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang dominan dan diterima secara luas oleh aktor-aktor politik. Konsolidasi melibatkan pembentukan kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma demokratis yang kokoh di antara masyarakat dan elit politik, sehingga demokrasi terjaga dan terus berkembang.³
- d. **Pemilihan Umum (Pemilu)** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

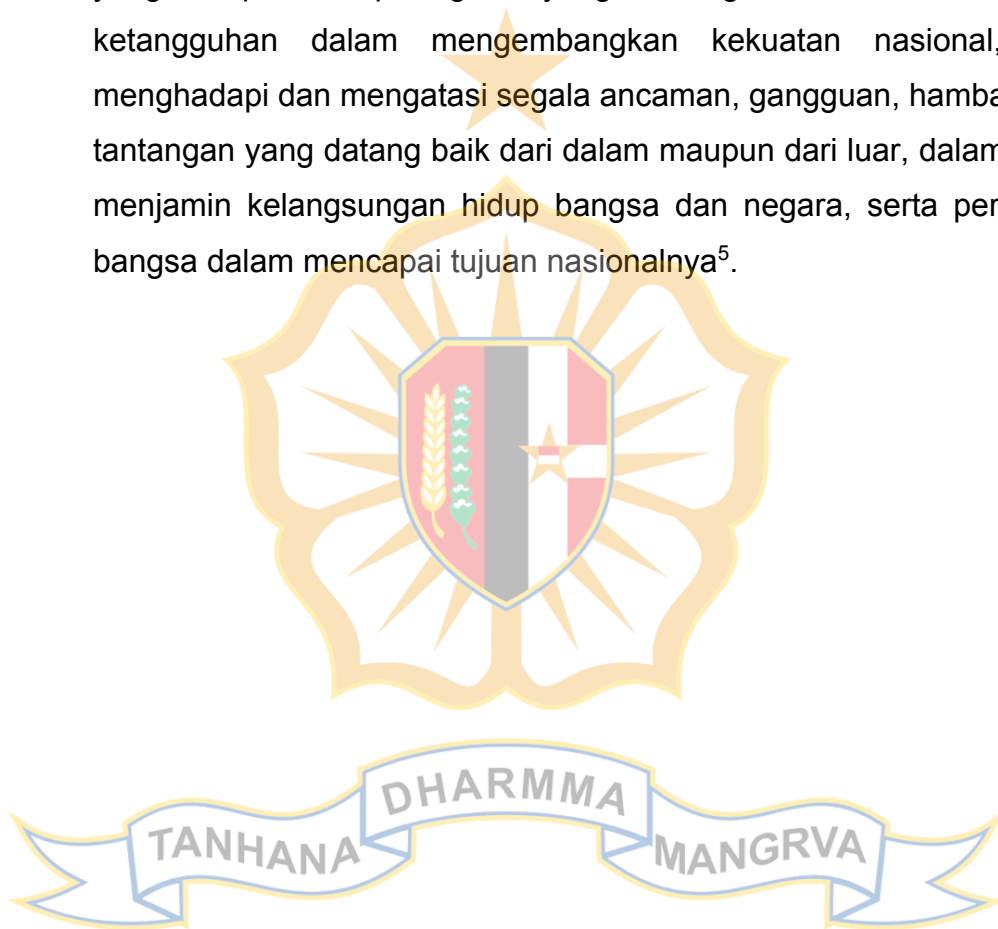
¹ <https://www.kontenpedia.com/detail/news/500899/politik/politik-identitas-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

² <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/13/080000469/8-definisi-demokrasi-menurut-ahli?page=all> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB

³ Larry Diamond "Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World" (2008)

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut.⁴

- e. **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota. Itu sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1).
- f. **Ketahanan Nasional.** Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi delapan gatra yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya⁵.



⁴ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 (1)

⁵ Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2023. *Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Lemhannas RI

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Politik identitas pada dasarnya merupakan praktek politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki identitas yang sama, seperti suku, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau latar belakang budaya tertentu. Tujuan dari politik identitas adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak anggota kelompok tersebut yang mungkin terpinggirkan atau tidak terwakili dalam kebijakan dan struktur kekuasaan yang ada. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konsep politik identitas telah mengalami pergeseran makna dan semangat politisnya. Ada kecenderungan penggunaan politik identitas sebagai strategi politik untuk mencapai kepentingan kelompok atau individu tertentu tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas atau mengedepankan dialog dan kompromi.

Pergeseran ini dapat memiliki dampak negatif, karena politik identitas yang digunakan secara eksklusif atau sebagai siasat politik dapat memperdalam polarisasi sosial, menghalangi pemahaman dan kerjasama antara kelompok-kelompok berbeda, serta mengurangi ruang bagi diskusi rasional dan pemecahan masalah yang inklusif. Hal ini dapat menyebabkan munculnya ketegangan sosial dan pembentukan pertahanan yang kuat dari kelompok-kelompok yang merasa terancam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan kelompok dan menjaga keberagaman serta kerja sama sosial yang lebih luas. Politik identitas yang inklusif dan berorientasi pada penyelesaian masalah dapat membantu membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif.

Selanjutnya, untuk menguraikan permasalahan meminimalisasi dampak negatif politik identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI, diperlukan suatu tinjauan pustaka. Pada bab ini atau bab tinjauan pustaka akan dibahas tentang, peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis yang digunakan, data dan fakta serta

perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh. Peraturan perundangan yang akan digunakan diantaranya adalah Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kerangka teoretis yang akan digunakan untuk membahas meliputi teori Kebijakan, teori kepemimpinan, teori Motivasi, dan teori Kepemimpinan visioner.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan dalam Taskap ini antara lain sebagai berikut:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi warga negara. Hak ini memberikan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi politik mereka secara damai. Selain itu, kebebasan berkumpul juga memberikan warga negara hak untuk berkumpul dalam pertemuan, rapat umum, demonstrasi, dan aktivitas politik lainnya.

Dalam konteks politik identitas, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini memberikan wadah bagi kelompok-kelompok dengan identitas yang sama untuk berkumpul dan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka secara demokratis. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mendorong partisipasi politik yang inklusif dengan memberikan ruang bagi semua warga negara, termasuk kelompok-kelompok dengan identitas khusus, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan memastikan hak-hak ini dihormati, UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik yang inklusif dan pengakuan terhadap berbagai identitas dan aspirasi politik masyarakat adalah prinsip-prinsip sentral dalam membangun demokrasi yang kuat dan stabil.

b. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang undang (UU) RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memiliki peran penting dalam demokrasi di Indonesia. Secara umum, UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik berperan penting dalam mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung operasional partai politik secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan partai politik dapat berfungsi sebagai lembaga politik yang mewakili kepentingan masyarakat, mendorong partisipasi politik yang inklusif, dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

c. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang mengatur tentang proses pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk partisipasi politik, sistem pemilihan, dan pengaturan kampanye. Terkait dengan politik identitas dan demokrasi, UU ini mengandung beberapa prinsip dan ketentuan yang relevan. Salah satunya adalah prinsip kesetaraan dan tidak diskriminasi. UU ini menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. UU RI nomor 7 tahun 2017 juga mengatur tentang kampanye politik. Dalam konteks politik identitas, undang-undang ini memberikan batasan terhadap kampanye yang bersifat menghasut, memecah-belah, atau merendahkan kelompok agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan di dalam masyarakat.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Negara Kesatuan

Menurut C.F. Strong negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi pusatnya dalam satu badan legislatif

nasional/pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat.⁶

Konsolidasi demokrasi adalah proses penting dalam perkembangan politik suatu negara yang mengharuskan penguatan dan pematapan prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aspek. Di Indonesia, konsolidasi demokrasi melibatkan beberapa aspek utama, salah satunya adalah pengembangan institusi-institusi yang independen dan akuntabel. Hal ini mencakup lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Institusi-institusi ini harus bekerja secara independen tanpa intervensi politik dan harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Selain itu, konsolidasi demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi politik yang inklusif untuk semua warga negara. Ini berarti setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya konsolidasi demokrasi. Salah satu tantangan utama adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi, terutama dalam bentuk penyalahgunaan keuangan negara atau dana pembangunan oleh para calon legislatif dan pejabat publik, dapat merusak integritas institusi negara dan menghambat perkembangan demokrasi. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses politik.

Janji-janji yang tidak dipenuhi oleh para calon legislatif, seperti dalam hal dana pembangunan dan proyek strategis di daerah, memang merupakan masalah yang sering terjadi. Ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Selain itu,

⁶ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-bf62f03e3f409a9491f3d31fea24a03c.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

perlindungan hak asasi manusia juga masih menjadi isu penting, terutama dalam konteks hak minoritas dan hak-hak perempuan. Terakhir, kebebasan berpendapat sering kali dihadapi dengan pembatasan yang mempengaruhi media dan aktivis masyarakat sipil.

Untuk memperkuat demokrasi, Indonesia harus terus berusaha meningkatkan integritas institusi dengan menguatkan mekanisme pengawasan dan pemberantasan korupsi. Pembentukan sistem hukum juga penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, promosi hak asasi manusia dan kebebasan sipil harus menjadi bagian integral dari pembangunan demokrasi, dan penghapusan hambatan terhadap partisipasi politik yang inklusif harus ditegakkan dengan lebih kuat. Dengan berkomitmen pada langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi negara dan memastikan masa depan yang lebih demokratis dan inklusif bagi semua warga negara.

b. Teori Politik Identitas

Fenomena politik identitas yang dianalisis oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment" memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia, politik identitas juga merupakan elemen penting dalam dinamika sosial dan politik. Beragam kelompok identitas seperti etnis, agama, dan bahasa memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan opini publik, kebijakan publik, serta politik pemilihan umum.

Di Indonesia, politik identitas telah memainkan peran penting dalam dinamika politik dan sosial negara ini. Dalam konteks teori Donald L. Horowitz tentang politik identitas sebagai suatu garis atau batasan yang menentukan siapa yang diikutsertakan dan siapa yang dikecualikan dalam suatu kelompok atau konstituensi politik, Indonesia memiliki beragam kelompok identitas yang saling berkompetisi dan berinteraksi.

Salah satu aspek politik identitas yang paling mencolok di Indonesia adalah isu etnis dan agama. Negara dengan populasi yang beragam, Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang berbeda. Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945, negara ini telah berusaha

untuk membangun identitas nasional yang inklusif, yang dikenal sebagai "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tapi satu). Namun, politik identitas masih sering muncul dalam bentuk konflik antar-etnis dan antar-agama, terutama dalam situasi-situasi konflik seperti di Aceh dan Papua. Selain itu, politik identitas juga muncul dalam bentuk perjuangan hak-hak minoritas, seperti hak-hak LGBT dan hak-hak perempuan. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan, masih ada konflik politik seputar isu-isu ini di Indonesia. Politik identitas juga memainkan peran dalam pemilihan umum dan pembentukan koalisi politik. Partai politik sering kali mencoba memobilisasi basis pendukung mereka dengan menonjolkan identitas tertentu, seperti identitas agama atau etnis, dalam upaya untuk memenangkan pemilu.

Dalam konteks Indonesia, politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan beragam, dengan perdebatan dan konflik yang terus berlanjut seputar siapa yang diikutsertakan dan siapa yang dikecualikan dalam berbagai kelompok identitas. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mempromosikan inklusivitas dan kerukunan, tantangan dalam mengelola politik identitas tetap ada dan menjadi bagian penting dari dinamika politik negara ini.

c. Teori Konsolidasi Demokrasi

Menurut Cornel West "Race Matters" (1993), Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis serta nilai-nilai demokrasi. West berpendapat bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan politik, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang adil.⁷ Dalam konteks ini, West berargumen bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya melibatkan struktur politik formal, tetapi juga melibatkan budaya politik, keadilan sosial, dan inklusi yang merata dalam pengambilan keputusan politik.⁸

⁷ West, Cornel. 1993. Race Matters. Vintage Books

⁸<https://edubirdie.com/examples/race-matters-by-cornel-west-racism-in-america/> diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

West juga menekankan pentingnya pluralisme dalam konsolidasi demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus menghormati keragaman pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong dialog antarberagam kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama, saling menghargai, dan mengatasi konflik yang ada. Selain itu, West berpendapat bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan keterlibatan aktif warga dalam proses politik, bukan hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam kebijakan publik, pengawasan terhadap pemerintah, dan partisipasi dalam gerakan sosial. Namun, West juga mengakui bahwa konsolidasi demokrasi dapat menghadapi tantangan dan hambatan, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, diskriminasi rasial, dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi masyarakat untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan merangkul nilai-nilai demokrasi dengan teguh.

10. Data dan Fakta

a. Perkembangan Politik Identitas

Politik identitas mengacu pada strategi politik yang menekankan pada perbedaan identitas seperti suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain, untuk memperoleh dukungan politik. Ketika politik identitas disalahgunakan atau diperbesar, itu dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kemunduran demokrasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika politik identitas yang berkembang dalam demokrasi, hasilnya bisa merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan. Pemanfaatan politik identitas untuk meraih kekuasaan sering kali mengarah pada polarisasi sosial dan politik, peperangan psikologis, dan bahkan kekerasan. Ini dapat menghambat proses demokrasi yang sehat, termasuk dialog konstruktif, pengambilan keputusan yang rasional, dan inklusi masyarakat yang luas.

Politik identitas telah menjadi perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Politik identitas mengacu pada praktik-praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, gender, atau orientasi seksual, dan menggunakan

identitas tersebut sebagai dasar untuk memperoleh dukungan politik atau memobilisasi massa.

Pemilu tahun 2014 memang telah menghadirkan peningkatan peran politik identitas dalam perdebatan politik dan kampanye di beberapa negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu negara atau wilayah tertentu, tetapi bisa terjadi di berbagai belahan dunia. Isu-isu seperti agama, etnis, dan regionalisme sering kali menjadi fokus utama dalam diskusi politik pada pemilu tersebut. Para politisi dan partai politik sering menggunakan identitas sebagai alat untuk memperkuat basis dukungan politik mereka. Mereka mungkin menggali dukungan dengan menekankan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan identitas tertentu, seperti memperjuangkan kepentingan agama tertentu, mengutamakan hak-hak kelompok etnis tertentu, atau mempromosikan kepentingan wilayah atau daerah tertentu.

Akibatnya, polarisasi masyarakat menjadi semakin meningkat. Perbedaan identitas dijadikan sebagai pembeda dan digunakan untuk menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mungkin memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai isu politik, sekarang lebih sering terbagi berdasarkan identitas mereka. Polarisasi ini dapat mengakibatkan lingkungan politik yang lebih memecah belah, di mana perdebatan tidak lagi berfokus pada substansi isu, tetapi lebih terkait dengan afiliasi identitas. Hal ini dapat menyulitkan upaya mencapai kesepakatan dan mereduksi ruang untuk dialog dan kompromi politik yang konstruktif.

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, pertarungan antara pasangan calon Ahok-Djarot dan pasangan Anies-Sandiaga menjadi sorotan nasional. Kampanye ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu identitas, terutama agama dan etnis. Pernyataan kontroversial yang dikaitkan dengan agama oleh salah satu kandidat memicu polarisasi di tengah masyarakat. Protes massal dan perpecahan muncul di kalangan pendukung masing-masing kandidat, dan isu identitas memainkan peran sentral dalam konflik politik yang terjadi. Polarisasi yang muncul dalam konteks politik identitas bisa mengancam persatuan dan stabilitas sosial.

Hal ini dapat memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok identitas, mengurangi ruang untuk dialog konstruktif, dan menghambat penyelesaian isu-isu mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada pemilu tahun 2019, politik identitas tetap memainkan peran penting dan memengaruhi atmosfer politik. Isu-isu agama dan suku kembali mendominasi perdebatan, dan ketegangan serta konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda sering kali muncul dalam konteks pemilu tersebut. Polarisasi politik berbasis identitas dapat mempersempit ruang dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat. Ketika identitas menjadi fokus utama dalam perdebatan politik, isu-isu yang lebih mendasar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan dapat terabaikan. Diskusi yang seharusnya berkaitan dengan kebijakan publik, pembangunan ekonomi, isu lingkungan, atau kesejahteraan sosial sering kali terpinggirkan karena perdebatan yang lebih terfokus pada isu-isu identitas.

Selain itu, polarisasi politik identitas dapat merusak hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Ketegangan yang tinggi antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat memperburuk persepsi negatif, prasangka, dan stereotip antara mereka. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dan memperdalam pembagian dalam masyarakat. Penting untuk memahami bahwa polarisasi politik identitas memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada hanya mempengaruhi arena politik. Dalam jangka panjang, dampaknya dapat merusak kohesi sosial, menghambat pembangunan masyarakat yang inklusif, dan menghambat kemajuan nasional.

b. Kondisi Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi adalah proses memperkuat dan memperdalam fondasi demokrasi dalam suatu negara. Di Indonesia, konsolidasi demokrasi menjadi salah satu agenda penting sejak periode reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut menggantikan rezim otoriter Orde Baru dengan sistem politik yang lebih demokratis. Sejak itu, Indonesia telah melalui berbagai tahapan dan upaya untuk

membangun sistem politik yang lebih baik. Beberapa langkah yang diambil termasuk penyusunan dan pengesahan berbagai undang-undang yang mendasari demokrasi, seperti UUD 1945 yang direvisi, serta pembentukan lembaga-lembaga demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial. Selain itu, konsolidasi demokrasi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala menjadi sarana bagi warga negara Indonesia untuk memberikan suara dan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Berikut ini merupakan perjalanan konsolidasi demokrasi yang terjadi periode 2014 sampai dengan 2019.

Tahun 2014. Pada tahun tersebut, Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung pertama kali dalam sejarahnya. Pemilihan presiden tersebut diikuti oleh dua kandidat utama, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Proses pemilihan presiden tahun 2014 berlangsung dengan relatif lancar dan dianggap sebagai langkah maju dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilihan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menjalankan prinsip demokrasi dengan melibatkan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Pemilihan presiden langsung memungkinkan rakyat Indonesia untuk memberikan suara mereka secara langsung kepada calon presiden yang mereka pilih. Dalam pemilihan tahun 2014, Joko Widodo berhasil memenangkan suara mayoritas dan terpilih sebagai Presiden Indonesia yang ke-7.

Proses pemilihan Presiden tahun 2014 juga diiringi dengan upaya meningkatkan integritas dan transparansi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur jalannya pemilihan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keabsahan hasilnya. Keberhasilan pemilihan Presiden langsung pada tahun 2014 membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis yang berkembang memiliki kemampuan untuk mengadakan pemilihan yang berlangsung secara damai dan terorganisir. Hal ini menjadi landasan

kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pada tahun 2017, pada tahun ini, Indonesia memang mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai wilayah. Pilkada merupakan proses demokratisasi yang penting dalam memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta memperkuat prinsip desentralisasi di Indonesia. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka. Proses ini melibatkan partisipasi publik yang luas, baik dari calon pemimpin daerah maupun masyarakat yang memberikan suara mereka. Pilkada juga memberikan kesempatan bagi calon yang memiliki kompetensi dan visi yang baik untuk memimpin daerah mereka. Tentu saja, seperti halnya dalam proses demokrasi di mana pun, pemilihan kepala daerah di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan dan sengketa. Beberapa tantangan yang mungkin muncul antara lain adalah permasalahan terkait pembiayaan kampanye, keterlibatan politik uang, permasalahan keamanan, dan sengketa hasil pemilihan. Namun, secara keseluruhan, proses pemilihan ini dianggap sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terus berupaya meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilihan kepala daerah. Tindakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan sengketa yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis. Dengan adanya pemilihan kepala daerah yang diadakan secara reguler, Indonesia terus memperkuat prinsip demokrasi dan desentralisasi. Proses ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka, serta memberikan ruang bagi pemimpin yang terpilih untuk mengimplementasikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Tahun 2019. Pada tahun tersebut, Indonesia mengadakan pemilihan umum Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses pemilihan umum tahun 2019 melibatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahan yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, dan Prabowo Subianto sebagai pesaingnya. Pemilihan ini menandai kelanjutan kompetisi politik antara keduanya setelah pemilihan presiden tahun 2014. Secara umum, proses pemilihan umum tahun 2019 berjalan dengan tertib dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur jalannya pemilihan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keabsahan hasilnya.

Namun, seperti dalam setiap proses demokrasi, pemilihan umum tahun 2019 juga menghadapi beberapa permasalahan dan sengketa terkait hasil pemilihan. Beberapa isu yang muncul meliputi permasalahan teknis, sengketa terkait pelanggaran kampanye, tuduhan kecurangan, serta proses penyelesaian sengketa pasca pemilihan. Meskipun terdapat permasalahan dan sengketa tersebut, pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum tahun 2019 merupakan cerminan penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Proses ini juga menjadi ruang bagi persaingan politik yang sehat dan pengembangan sistem demokrasi yang lebih matang.

Secara umum, Konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan positif dengan pemilihan yang relatif lancar, partisipasi politik aktif, namun menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi politik identitas. Korupsi tetap menjadi masalah serius yang dapat menghambat pembangunan demokrasi, sementara ketimpangan ekonomi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta kelompok masyarakat yang berbeda, perlu diatasi. Perkembangan politik identitas yang semakin kuat dan polarisasi juga menjadi tantangan

dalam memperkuat konsolidasi demokrasi, dengan risiko memperuncing perbedaan agama, suku, atau kelompok sosial serta mengancam kesatuan dan toleransi.

11. Lingkungan Strategis

Dalam penulisan Taskap ini mempermudah mengidentifikasi lingkungan strategis yang dinamis, maka penulis membagi lingkungan strategis bahasan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: lingkungan global, lingkungan regional, dan lingkungan nasional.

a. Lingkungan Global

Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak global yang signifikan, terutama dalam sektor pangan dan energi. Rusia dan Ukraina memang merupakan dua negara produsen gandum terbesar di dunia, dan konflik ini dapat mengganggu rantai pasokan gandum global, yang berpotensi menciptakan krisis pangan. Ketika konflik terjadi secara langsung di wilayah yang merupakan produsen utama gandum, ekspor gandum dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pasokan gandum di pasar internasional dan menyebabkan kenaikan harga gandum secara global. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina akan terdampak secara signifikan, terutama mereka yang memiliki ketergantungan pangan tinggi.

Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu produsen energi terbesar di dunia. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat telah menciptakan ketidakpastian di pasar energi global. Sikap anti-Rusia dari pihak Barat dapat mengarah pada sanksi ekonomi terhadap Rusia, termasuk dalam sektor energi. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia, karena Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ketika ada kekhawatiran mengenai pasokan minyak dari Rusia, harga minyak global dapat meningkat.

Ketidakstabilan ekonomi dan harga yang tinggi dalam sektor pangan dan energi memiliki dampak luas pada perekonomian global. Negara-negara yang bergantung pada impor bahan pangan dan energi

dari Rusia dan Ukraina, serta negara-negara yang terhubung dengan rantai pasokan global, akan merasakan dampaknya. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi di beberapa wilayah.

Selain konflik Rusia dan Ukraina, lingkungan Global dipengaruhi juga persaingan Amerika dan China. Tren kebangkitan Tiongkok dan persaingan dengan Amerika Serikat yang terlihat dari visi pembangunan arsitektur kawasan memang merupakan fenomena yang signifikan dalam geopolitik global.

Tiongkok menginisiasi *Belt and Road Initiative* (BRI), yang merupakan proyek ambisius untuk membangun infrastruktur yang melintasi berbagai negara di Asia, Eropa, dan Afrika. BRI bertujuan untuk memperkuat pengaruh Tiongkok secara ekonomi dan politik dengan menawarkan pendanaan infrastruktur kepada negara-negara mitra. Melalui pendekatan bilateral, Tiongkok berusaha menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut. BRI telah mendapatkan dukungan dari beberapa negara, terutama yang berada di jalur proyek infrastruktur yang diusulkan, sementara juga mengundang kritik dari pihak lain yang mengkhawatirkan implikasi politik dan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, Amerika Serikat menginisiasi Indo-Pasifik Ekonomi *Framework*. Inisiatif ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, namun dengan ambisi yang lebih besar. Selain membangun pilar ekonomi yang tangguh, Amerika Serikat juga berupaya melakukan reformasi struktural di kawasan tersebut. Hal ini melibatkan upaya untuk memperkuat aturan hukum internasional, mendukung kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah perairan yang strategis, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam bidang ini memiliki implikasi yang luas, termasuk aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Kedua negara berusaha memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Pasifik melalui pendanaan infrastruktur dan

kerja sama ekonomi. Persaingan ini juga mencerminkan pergeseran kekuatan geopolitik global yang sedang berlangsung.

Namun, penting untuk diingat bahwa visi dan strategi ini bukanlah hal yang tetap dan dapat berubah seiring waktu. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda, dan perubahan politik dan ekonomi di tingkat nasional dan global dapat mempengaruhi dinamika persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam jangka panjang.

b. Lingkungan Regional

Kondisi demokrasi di kawasan Timur Tengah dan ASEAN dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh perubahan politik, perubahan sosial, dan perubahan kebijakan. Kawasan timur tengah masih menghadapi berbagai konflik antar negara dan konflik internal yang terkait dengan masalah politik dan demokrasi. Beberapa faktor yang berperan dalam konflik ini antara lain persaingan kekuasaan, perbedaan ideologi, ketegangan etnis dan agama, serta ketidakpuasan sosial.

Konflik antar negara di kawasan Timur Tengah melibatkan intervensi asing, rivalitas regional, dan persaingan geopolitik. Misalnya, konflik di Suriah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun melibatkan pemerintah Suriah, kelompok pemberontak, dan intervensi dari aktor-aktor regional dan internasional. Selain itu, konflik antara Israel dan Palestina juga merupakan salah satu sumber ketegangan di kawasan ini. Konflik dalam negeri yang terkait dengan demokrasi sering kali muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan persaingan politik yang sengit. Protes massa, unjuk rasa, dan konflik bersenjata di beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak, Lebanon, dan Yaman merupakan contoh-contoh konflik dalam negeri yang berhubungan dengan upaya masyarakat untuk memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan perubahan politik. Situasi yang kompleks

dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini telah mempengaruhi perkembangan demokrasi di wilayah tersebut.

Di kawasan ASEAN, salah satu contoh kegagalan dalam reformasi demokrasi adalah Myanmar (sebelumnya dikenal sebagai Burma). Myanmar mengalami periode lama pemerintahan otoriter sebelum adanya reformasi pada awal 2010-an. Namun, meskipun terjadi beberapa perubahan menuju demokrasi, situasinya belum stabil. Pada awal 2021, militer di Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih dan kembali mengendalikan kekuasaan, mengakibatkan penurunan signifikan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut. Perubahan politik yang terjadi di negara-negara ini seringkali rumit dan dapat melibatkan berbagai faktor seperti pertentangan kepentingan, ketidakstabilan sosial, intervensi asing, dan tantangan terhadap keamanan nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghadapi tantangan tersebut dengan pendekatan yang beragam dan komprehensif dalam rangka memperbaiki kondisi demokrasi.

Tetap memperkuat reformasi politik, membangun institusi yang kuat, mempromosikan kebebasan sipil, dan melindungi hak asasi manusia tetap menjadi langkah-langkah yang penting dalam memperbaiki kondisi demokrasi di kawasan Timur Tengah dan ASEAN. Namun, perlu diakui bahwa perubahan tersebut mungkin memerlukan waktu yang lama dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang signifikan. Kerjasama regional dan dukungan internasional juga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses reformasi demokrasi di kawasan ini.

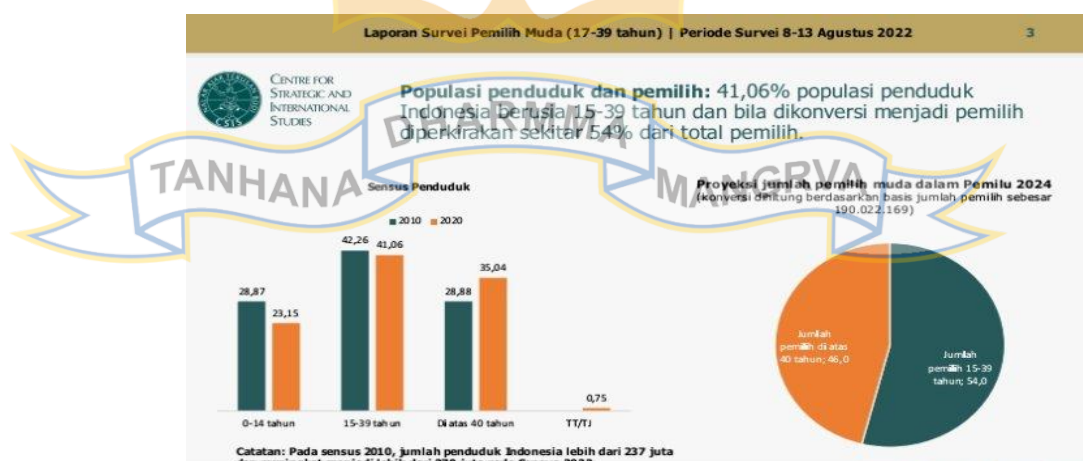
c. Lingkungan Nasional

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang berpengaruh terhadap politik Identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi dapat dilihat dari delapan gatra yang saling berpengaruh, antara lain:

- 1) **Gatra Geografi.** Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah dengan ciri khasnya masing-masing dapat mempengaruhi politik identitas di negara ini. BPS mencatat,

Indonesia memiliki 17.001 pulau pada 2022. Jumlah tersebut terdiri dari enam pulau besar dan 16.995 pulau lainnya yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia⁹. Perbedaan geografis yang signifikan antara pulau-pulau dan daerah-daerah di Indonesia menciptakan variasi budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat di seluruh negara. Perbedaan-perbedaan ini sering kali menjadi faktor penting dalam membentuk identitas lokal yang kuat di masing-masing daerah.

- 2) **Gatra Demografi.** Bonus demografi di Indonesia memiliki potensi besar untuk mempengaruhi politik identitas melalui struktur penduduk yang beragam. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia telah mencapai angka 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023¹⁰. Suatu fenomena yang menarik adalah hasil survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada September 2022, yang memprediksi bahwa dalam Pemilu 2024, hampir 60 persen dari pemilih akan berusia antara 17 hingga 39 tahun. Hasil ini selaras dengan temuan survei CSIS yang sama, yang mengelompokkan pemilih muda sebagai kombinasi generasi Z (usia 17-23 tahun) dan generasi milenial (usia 24-39 tahun).



Tabel 1. Laporan Survei Pemilih Pemuda

Sumber : Pemilih Muda Jadi Sasaran Partai Politik di Pemilu 2024 - Tribun-timur.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 20.00 WIB

⁹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-punya-17001-pulau-pada-2022-paling-banyak-di-mana> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

¹⁰ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.30 WIB

Diluar itu, partisipasi politik pemilih muda telah mengalami peningkatan sepanjang rentang Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, melompat dari 85,9 persen menjadi 91,3 persen.¹¹ Namun, ironisnya, meskipun partisipasi meningkat, data survei juga mencerminkan penurunan dalam dukungan terhadap demokrasi dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Bahkan, lebih dari sepertiga dari total responden menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Menghadapi proporsi pemilih muda yang semakin besar dalam Pemilu 2024, partai politik sedang berkompetisi untuk merebut perhatian segmen ini. Salah satu strategi yang digunakan adalah mendukung calon legislatif (caleg) dari kalangan milenial, sebagai upaya untuk merangsang partisipasi dan keterlibatan pemilih muda dalam arena politik.

- 3) **Gatra Sumber Kekayaan Alam.** Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, dan tidak terbatas hanya pada kekayaan hayatinya saja. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang yang berharga. Di negara ini, dapat ditemukan cadangan sumber daya tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Semua sumber daya tambang ini menjadi aset penting dalam mendukung sektor industri dan ekonomi. Wilayah perairan Indonesia juga sangat luas, mencapai 7,9 juta km². Potensi alam yang terkandung dalam perairan ini sangat besar dan beragam. Laut Indonesia menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta menyimpan berbagai jenis sumber mineral. Kekayaan sumber daya alam ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kekuatan politik, dan akses terhadap kesempatan ekonomi dapat memicu politik

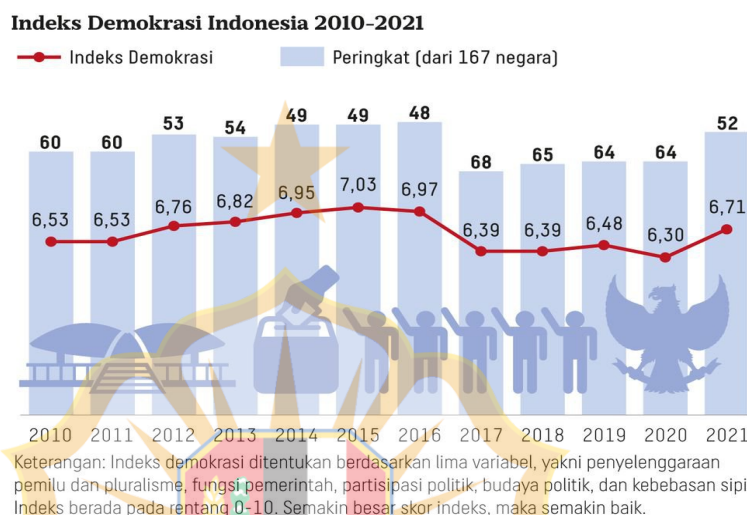
¹¹ [Pemilih Muda Jadi Sasaran Partai Politik di Pemilu 2024 - Tribun-timur.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 20.00 WIB

identitas. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak adil cenderung mencari solusi politik yang berdasarkan identitas mereka untuk memperjuangkan keadilan dan pengakuan yang lebih besar. Pengakuan akan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan politik dapat membantu mengurangi konflik politik identitas dan mendorong inklusi sosial yang lebih baik.

- 4) **Gatra Ideologi.** Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan prinsip-prinsip yang menghargai keragaman dan mempromosikan persatuan. Dengan memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, diharapkan dapat mencegah polarisasi politik yang berdasarkan pada identitas suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan menghormati kebhinekaan sebagai pondasi negara, sehingga mempromosikan nilai-nilai inklusifitas dan toleransi di antara seluruh warga negara Indonesia. Melalui pendekatan yang mengedepankan Pancasila, diharapkan perbedaan dan konflik yang mungkin timbul dapat diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, dan menghormati hak-hak asasi manusia.

- 5) **Gatra Politik.** Pada awal Februari 2022, The Economist Intelligence Unit (EIU) meluncurkan Indeks Demokrasi 2021, yang menggambarkan kondisi demokrasi di berbagai negara. Indeks ini memberikan skor pada skala 0 hingga 10, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi demokrasi yang lebih baik. Untuk Indonesia, skor rata-rata pada indeks ini mencapai 6,71. Ini menandakan peningkatan dari skor sebelumnya pada tahun 2020 yang hanya mencapai 6,30, yang juga merupakan skor terendah sejak indeks ini pertama kali disusun oleh EIU pada tahun 2006. Perubahan skor ini juga berdampak pada peringkat Indonesia dalam indeks tersebut. Posisi Indonesia dalam peringkat dunia naik

dari urutan 64 pada tahun sebelumnya menjadi urutan 52 dari total 167 negara yang dievaluasi. Indonesia juga termasuk dalam 10 negara yang mengalami peningkatan skor terbesar dalam hal demokrasi. Namun demikian, meskipun mengalami peningkatan, Indonesia masih tergolong dalam kategori "demokrasi cacat" berdasarkan klasifikasi indeks tersebut.



Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia 2010 – 2021

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.00 WIB

Tingkat demokrasi yang lebih baik ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor, terutama sikap pemerintah. Terdapat peningkatan dalam keberfungsian pemerintah, dimana skornya naik dari 7,50 menjadi 7,86. Kebebasan sipil juga mengalami kenaikan dari 5,59 menjadi 6,18, dan partisipasi politik juga meningkat drastis dari 6,11 menjadi 7,22. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memiliki dampak positif dalam meningkatkan kondisi demokrasi.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dalam menghimpun skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari penilaian ini, terungkap bahwa Yogyakarta meraih skor tertinggi dengan torehan 85,62 poin dari skala 0-100 poin. Skor ini menunjukkan peningkatan dari capaian dan metode lama yang hanya mencapai 81,21 poin pada tahun

2021. Selain itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dengan masing-masing memperoleh nilai 84,92 poin dan 84,79 poin, naik dari tahun sebelumnya. DKI Jakarta, yang biasanya memiliki posisi yang tinggi dalam berbagai peringkat, justru berada di posisi tujuh dengan perolehan skor 82,13 poin pada tahun yang sama. Rerata skor nasional pada tahun tersebut adalah 80,41 poin. Dari penilaian tersebut, terungkap bahwa terdapat tiga provinsi dengan perolehan skor di bawah rerata nasional, yaitu Maluku Utara dengan skor 62,93 poin, Papua Barat dengan skor 64,02 poin, dan Papua dengan skor 66,65 poin¹².

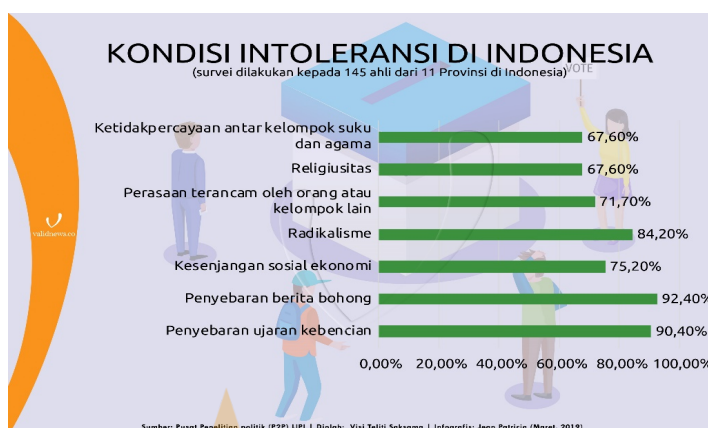
- 6) **Gatra Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen pada Triwulan 4-2022 dan penutupan tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,31 persen merupakan pencapaian yang mengesankan mengingat perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung.¹³ Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh kombinasi aktivitas masyarakat yang semakin menggeliat dan kebijakan fiskal serta moneter yang diterapkan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi, baik dalam sektor produksi maupun konsumsi. Meskipun beberapa sektor utama seperti Industri, pertanian, pertambangan, dan konstruksi masih tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, ada tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan kontribusi mereka. Selain itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih belum mencapai level sebelum pandemi, mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang perlu dipulihkan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah dan pelaku ekonomi di Indonesia perlu merangsang pertumbuhan sektor-sektor utama, memperkuat sektor-sektor tertinggal, dan mengimplementasikan

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/yogyakarta-kantongi-skor-indeks-demokrasi-indonesia-tertinggi-2022> diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 19.00 WIB

¹³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html> diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 21.00 WIB

kebijakan yang mempercepat pemulihan daya beli konsumen. Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan ekonomi masih menjadi faktor yang berpotensi memicu politik identitas kelompok-kelompok tertentu. Ketidakadilan ekonomi dapat mendorong politik identitas berbasis etnis, agama, atau kelompok sosial yang mencari keadilan ekonomi melalui perjuangan politik.

- 7) **Gatra Sosial Budaya.** Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan beragam dalam hal kebudayaan, dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan 2.500 jenis bahasa, serta kekayaan warisan budaya baik benda maupun tak benda. Negara ini memiliki struktur budaya yang sangat kompleks dan beragam, sebagaimana diakui oleh Fransesco Bandarin sebagai negara adikuasa di bidang budaya pada sidang UNESCO ke-39 di Paris pada tahun 2017. Warisan budaya Indonesia yang luar biasa ini menjadi sumber kebanggaan dan harus dijaga serta dilestarikan dengan baik. Namun, di tengah kekayaan budaya yang luar biasa ini, tantangan yang perlu dihadapi adalah persoalan intoleransi yang tengah mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Intoleransi ini tidak hanya berkaitan dengan Indonesia semata. Intoleransi dan kekerasan yang berakar dari faktor agama telah merasuki masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. Tindakan-tindakan intoleransi ini terutama merugikan minoritas agama, sekte, agama lokal, dan gerakan keagamaan baru yang juga berdampak pada sosial budaya secara lebih luas. Fenomena intoleransi dalam kerangka sosial budaya ini termanifestasi dalam pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus berupaya mempromosikan keragaman budaya sambil mengatasi tantangan intoleransi ini guna memastikan harmoni dan keberagaman tetap menjadi kekuatan utama negara ini.



Tabel 3. Kondisi Intoleransi di Indonesia

Sumber : <https://validnews.id/nasional/Intoleransi-Jadi-Problem-Bersama-ASEAN-ZWa> diakses pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 19.00 WIB

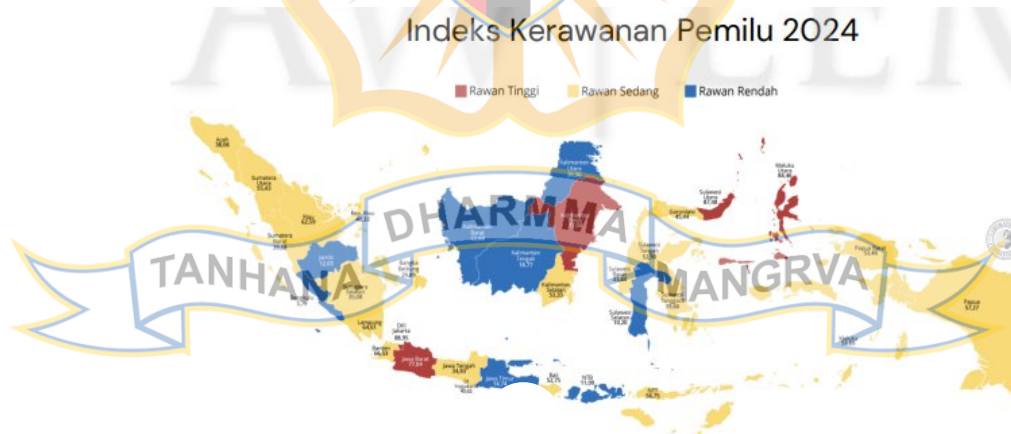
Dalam konteks politik identitas, kelompok-kelompok yang terdampak oleh intoleransi ini dapat memobilisasi dukungan politik dengan mengangkat isu-isu terkait identitas budaya atau agama mereka. Mereka mungkin akan berupaya melindungi atau memajukan kepentingan kelompok mereka, mempertahankan tradisi dan adat istiadat, atau memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang mereka anut. Oleh karena itu, penanganan intoleransi dan pelestarian keragaman budaya harus menjadi prioritas dalam menghadapi kompleksitas situasi politik dan sosial, sehingga Indonesia dapat terus menjadi tempat di mana harmoni dan saling pengertian berdampingan dengan kekayaan budaya yang tak ternilai.

8) **Gatra Pertahanan dan Keamanan.** Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang di keluarkan oleh Bawaslu RI, beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dalam hasil IKP tersebut, terungkap berbagai kategori provinsi berdasarkan tingkat kerawanan, yakni tinggi, sedang, dan rendah.

Dalam kategori kerawanan tinggi, beberapa provinsi muncul dengan skor yang mencolok. Jakarta memimpin dengan skor 88,95, diikuti oleh Sulawesi Utara dengan skor 87,48, Maluku Utara

dengan skor 84,86, Jawa Barat dengan skor 77,04, dan Kalimantan Timur juga dengan skor 77,04. Sementara itu, provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori kerawanan sedang mencapai jumlah 21 provinsi. Contohnya adalah Banten dengan skor 66,53, Lampung dengan skor 64,61, Riau dengan skor 62,59, Papua dengan skor 57,27, dan Nusa Tenggara Timur dengan skor 56,75. Namun, terdapat juga delapan provinsi yang dapat dikategorikan sebagai rendah kerawanan, menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Di antara provinsi-provinsi ini adalah Kalimantan Utara dengan skor 20,36, Kalimantan Tengah dengan skor 18,77, Jawa Timur dengan skor 14,74, Kalimantan Barat dengan skor 12,69, dan Jambi dengan skor 12,03.¹⁴

Oleh karena itu diperlukan, langkah-langkah untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan netralitas keamanan dalam proses pemilu perlu diterapkan. Dalam konteks politik identitas yang dipicu oleh pertahanan dan keamanan, kelompok-kelompok tersebut mungkin memobilisasi dukungan politik dengan mengangkat isu-isu yang terkait dengan identitas mereka.



Gambar 1. Indeks Kerawanan Pemilu 2024
Sumber : Paparan Gubernur Lemhannas RI “Lead 2045”

¹⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/luncurkan-indeks-kerawanan-pemilu-2024-bawaslu-harap-semua-daerah-tetap-kondusif> _diakses pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 21.00 WIB

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini mencerminkan perlunya kesadaran semua pihak untuk mengambil langkah konkret dalam memperkuat pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berbagai tantangan politik seperti perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan isu-isu yang mempengaruhi persatuan bangsa mendorong pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu dalam keberagaman. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila mampu menyatukan bangsa yang beragam, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu) telah menjadi landasan bagi kehidupan bersama dalam NKRI.

Di dalam kerangka teori negara kesatuan C.F. Strong, Indonesia memiliki struktur politik yang mengandalkan sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat. Namun, penting untuk diingat bahwa negara kesatuan bukanlah jaminan untuk konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi melibatkan pembangunan institusi dan norma-norma yang mendukung sistem demokrasi yang stabil dan efektif. Ini mencakup pengembangan sistem hukum independen, pemerintahan yang akuntabel, partisipasi politik yang inklusif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan politik identitas menjadi salah satu permasalahan penting dalam konteks politik Indonesia. Kompleksitas hubungan antaridentitas budaya, agama, dan suku dapat memengaruhi dinamika politik dan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi terencana dan terkoordinasi untuk menghadapi tantangan ini dengan mengutamakan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menghadapi peristiwa demokrasi yang mendekat, seperti pemilihan tahun 2024, suhu politik mungkin semakin memanas. Namun, ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah dan elit partai untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Upaya ini harus mencakup pengembangan sistem

hukum independen, pemerintahan yang akuntabel, partisipasi politik yang inklusif, dan mekanisme pemilihan yang adil dan bebas.

Pandangan Samuel Huntington tentang pelembagaan politik menjadi relevan dalam menghadapi tantangan politik identitas. Lembaga politik yang kuat dan terlembagakan dengan baik dapat membantu membangun konsolidasi demokrasi yang inklusif. Konsep pelembagaan politik yang mencakup fleksibilitas, kompleksitas, otonomi, dan kesatuan lembaga-lembaga politik dapat membantu mengelola dinamika politik identitas dan meminimalkan potensi konflik. Ini dapat menjadi landasan yang bermanfaat dalam membentuk kerangka kerja demokrasi yang stabil dan inklusif dalam menghadapi tantangan politik identitas yang kompleks.

Pandangan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara lembaga-lembaga politik berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik yang terkait dengan politik identitas. Dalam konteks membangun konsolidasi demokrasi, konsep pelembagaan politik dapat memberikan panduan dalam merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan politik identitas. Dengan mengutamakan fleksibilitas, kompleksitas, otonomi, dan kesatuan lembaga-lembaga politik, upaya membangun konsolidasi demokrasi dapat mengatasi potensi konflik yang diakibatkan oleh politik identitas yang radikal. Dengan demikian, konsep pelembagaan politik dapat menjadi landasan yang bermanfaat dalam membentuk kerangka kerja demokrasi yang stabil dan inklusif dalam menghadapi kompleksitas tantangan politik identitas.

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Politik Identitas Saat Ini

Politik identitas adalah fenomena kompleks yang memengaruhi dinamika politik dan sosial dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Menurut pakar politik Universitas Duke, Donald L. Horowitz, politik identitas dapat dilihat sebagai upaya untuk menggambar garis antara mereka yang diterima dan mereka yang ditolak dalam suatu masyarakat.¹⁵ Ini menciptakan status keanggotaan yang permanen dan mempengaruhi bagaimana individu dan

¹⁵ Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126

kelompok diterima dalam komunitas tersebut. Lebih lanjut, Cressida Heyes menyatakan bahwa politik identitas mencakup lebih dari sekadar pertentangan atau perbedaan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang mempengaruhi pandangan individu tentang diri mereka sendiri dan kelompok mereka. Dalam konteks ini, politik identitas digunakan oleh komunitas, kelompok, dan organisasi sosial tertentu untuk mengatasi isu-isu yang mereka anggap tidak adil berdasarkan pengalaman mereka.

Lukmantor menambahkan dimensi lain dengan mengatakan bahwa memiliki identitas yang sama dalam hal gender, ras, suku, agama, atau identitas gender dapat menyatukan anggota kelompok dalam mendukung agenda politik tertentu. Ini mengarah pada politik identitas yang sering kali disebut sebagai politik perbedaan. Ini dapat dilihat dalam upaya untuk mempengaruhi perumusan kebijakan yang dapat memengaruhi basis primordialisme, seperti kebijakan etnis yang mendorong otonomi khusus atau bahkan gerakan separatis.

Namun, penting untuk diingat bahwa politik identitas dapat memiliki dampak yang beragam. Profesor Ahmad Syafii Maarif menekankan bahwa selama rasa persatuan dan kesatuan tetap dijaga, serta prinsip-prinsip seperti Sumpah Pemuda dan Pancasila dihormati, politik identitas tidak selalu berdampak negatif bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia¹⁶. Dalam konteks ini, politik identitas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok tanpa mengancam stabilitas nasional.

Tetapi, ada pula pandangan yang menentang politik identitas. Cressida J. Heyes dan Lukmantoro, misalnya, memiliki pendapat yang sama dalam hal ini, meskipun dengan tujuan yang berbeda. Mereka mengkritik politik identitas karena bisa memicu konflik dan diskriminasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Politik identitas dapat memperkuat primordialisme dan etnosentrisme, yang pada gilirannya bisa memicu perpecahan, terorisme, dan konflik antar kelompok. Ini sering kali muncul dalam konteks kebijakan etnis yang kurang bijaksana.

¹⁶ Maarif, A. S. (2017). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina

Terakhir, penilaian Donald L. Horowitz bahwa penjelasan tentang politik identitas sebaiknya netral adalah penting. Horowitz memandang politik identitas sebagai topik yang saat ini sangat populer, tetapi yang harus didekati dengan keterbukaan dan tanpa pandangan yang memihak. Ini memungkinkan berbagai pandangan dan sudut pandang untuk diajukan dan dibahas dalam dialog yang konstruktif. Dengan demikian, politik identitas adalah fenomena yang kompleks dan dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks dan implementasinya. Penting untuk mempertimbangkan keragaman pandangan dalam diskusi tentang politik identitas dan memastikan bahwa hal ini tidak mengancam stabilitas dan persatuan dalam masyarakat.

Namun, sebuah tantangan muncul ketika politik identitas bergerak dari tuntutan pengakuan menjadi tuntutan superioritas kelompok. Dalam beberapa situasi, upaya ini bisa menjadi destruktif karena kelompok yang bersangkutan ingin merasa lebih unggul atau bahkan menghancurkan kelompok lain yang dianggap berbeda. Ketika politik identitas berubah menjadi alat untuk memperkuat pandangan superioritas, hal ini dapat memicu konflik, kekerasan, dan diskriminasi yang lebih luas terhadap kelompok lain. Hasilnya, kesenjangan sosial yang ada bisa memperlebar dan polarisasi politik semakin meningkat.

Dampak negatif dari politik identitas yang ekstrem dan superioritas kelompok membutuhkan pendekatan yang cermat dan bijak. Penting bagi masyarakat dan pemimpin untuk mempromosikan dialog dan pemahaman lintas kelompok. Mengakui pentingnya identitas individu tanpa mengabaikan hak-hak dan martabat kelompok lain menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial. Di sinilah peran lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi yang lebih inklusif dan saling menghormati.

Penting untuk diingat bahwa politik identitas pada dasarnya tidak negatif, karena dapat mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kelompok yang berbeda. Namun, ketika politik identitas berubah menjadi alat untuk memperkuat superioritas atau mengorbankan kelompok lain, ini dapat mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, mengelola politik identitas dengan

bijak dan mengupayakan inklusifitas adalah tantangan penting dalam menjaga harmoni dan kemajuan masyarakat.

Sedangkan menurut Chantal Mouffe dalam bukunya yang berjudul "*Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*": mengemukakan konsep politik identitas sebagai salah satu bentuk yang kompleks dalam ranah politik¹⁷. Baginya, politik identitas melibatkan aspek identitas sosial, budaya, dan pribadi individu yang membentuk pandangan dan afiliasi politik mereka. Mouffe menegaskan bahwa konflik adalah elemen sentral dalam politik identitas. Dia meyakini bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dihapuskan, tetapi justru menjadi elemen penting dalam menjaga vitalitas demokrasi. Menurut pandangan Mouffe, konflik dalam politik identitas mampu memicu diskusi, debat, dan pertentangan yang mendalam, yang pada akhirnya dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan mewakili beragam kepentingan dalam masyarakat.

Mouffe juga berpendapat bahwa konflik dalam politik identitas dapat diintegrasikan dengan demokrasi. Ia mengakui bahwa demokrasi tidak selalu harmonis, tetapi justru mampu mengakomodasi berbagai perbedaan dan pertentangan. Melalui konflik, warga negara dapat mengartikulasikan aspirasi, nilai, dan tujuan mereka dengan cara yang terbuka dan terstruktur. Konflik ini, menurut Mouffe, harus diarahkan ke dalam bentuk politik yang memungkinkan untuk perdebatan terbuka, negosiasi, dan kompromi, sehingga berbagai identitas dan pandangan politik dapat diperlakukan dengan adil dan setara dalam konteks demokratis.

Konsep politik identitas yang diuraikan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "*Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*" dan pandangan Chantal Mouffe dalam bukunya "*Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*" merupakan dua pendekatan yang memberikan pemahaman yang berbeda, namun saling terkait, tentang politik identitas. Keduanya memiliki dampak yang kompleks terhadap politik identitas di Indonesia saat ini.

¹⁷ Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. "*Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*." Verso, 1985.

Di Indonesia, dinamika politik identitas mencerminkan kompleksitas masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Dalam era globalisasi dan modernitas, ketidakpastian sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan identitas yang merangsang munculnya berbagai gerakan politik identitas. Gerakan agama, seperti yang terlihat dalam upaya penegakan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, dan gerakan etnis yang berjuang untuk mempertahankan budaya dan hak-hak mereka, menjadi semakin signifikan. Mereka mencari pengakuan dan martabat di tengah transformasi cepat yang terjadi dalam masyarakat.

Fukuyama memperingatkan tentang bahaya polarisasi politik, yang di Indonesia tercermin dalam konflik antara kelompok agama dan etnis, serta antara kelompok liberal dan konservatif. Konflik antar-agama dan antar-etnis dapat menyulut ketegangan sosial yang serius, sementara perbedaan dalam pandangan antara kelompok liberal yang mendukung perubahan progresif dan kelompok konservatif yang cenderung mempertahankan tradisi bisa menimbulkan gesekan politik. Dengan melihat kondisi ini, Indonesia perlu memprioritaskan upaya untuk memfasilitasi dialog antar kelompok, menciptakan inklusivitas, dan membangun pemahaman bersama. Ini penting untuk mencegah eskalasi konflik, memastikan representasi setiap kelompok, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Di sisi lain, Pandangan Chantal Mouffe tentang politik identitas sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, terutama mengingat kondisi politik yang seringkali terjadi konflik dan polarisasi. Mouffe memahami bahwa dalam masyarakat demokratis, konflik politik tidak bisa dihindari. Dia berpendapat bahwa identitas politik merupakan salah satu aspek utama dalam dinamika politik, di mana kelompok-kelompok berkompetisi untuk mengendalikan agenda politik. Di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana kompetisi antara berbagai kelompok politik telah meningkatkan ketegangan politik. Misalnya, terdapat persaingan antara kelompok agama yang konservatif yang ingin mengendalikan agenda moral dan sosial, dengan kelompok progresif yang mendorong perubahan sosial yang lebih liberal. Ini mencerminkan dinamika

hegemoni yang dinamis yang diusulkan oleh Mouffe, di mana berbagai kelompok bersaing untuk memperoleh dominasi politik.

Dampak dari kompetisi ini adalah meningkatnya polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Perpecahan politik semakin dalam, yang dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus dan bekerja sama dalam memecahkan masalah-masalah penting. Selain itu, polarisasi ini juga dapat mengancam stabilitas politik dan sosial negara.

Pentingnya memahami pandangan Mouffe adalah untuk mengakui bahwa konflik politik adalah bagian alami dari demokrasi. Namun, penting juga untuk mencari cara-cara untuk mengelola konflik ini secara konstruktif dan menciptakan ruang bagi dialog dan kompromi. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia meredakan ketegangan politik, mempromosikan kerja sama lintas kelompok, dan memperkuat dasar demokrasi yang sehat di negara ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas di Indonesia meliputi keanekaragaman budaya, agama, dan suku di negara ini yang memberikan dasar untuk munculnya berbagai identitas yang berbeda dan saling berkompetisi dalam arena politik. Selain itu, polarisasi politik yang semakin tajam juga turut memengaruhi politik identitas, di mana isu-isu sensitif seperti agama dan suku sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih dukungan politik. Peran media sosial sebagai sarana cepat dan luas untuk menyebarkan pandangan dan retorika identitas juga tidak bisa diabaikan, karena dapat memperkuat persepsi dan memicu reaksi emosional dalam masyarakat. Selain itu, peristiwa sejarah seperti konflik-konflik masa lalu atau pergeseran politik juga dapat membentuk pandangan identitas masyarakat dan mempengaruhi dinamika politik identitas di Indonesia. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi politik identitas di Indonesia, antara lain:

a. Konflik dan ketegangan sosial

Konflik dan ketegangan sosial, terutama yang berkaitan dengan etnis, agama, atau budaya yang belum terselesaikan, memiliki potensi besar untuk memicu politik identitas. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan cenderung mencari solidaritas dan perlindungan dalam politik identitas. Hal ini terjadi karena perasaan memiliki pengalaman dan

perbedaan bersama mendorong mereka untuk bersatu demi mengatasi tantangan bersama. Diskriminasi juga memainkan peran penting dalam munculnya politik identitas, mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk organisasi politik atau gerakan sosial yang fokus pada memperjuangkan hak-hak mereka.

Namun, perlu diingat bahwa politik identitas juga dapat memperdalam polarisasi dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan inklusif dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik, dengan mengedepankan dialog, saling pengertian, dan pengakuan terhadap keberagaman identitas. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa perdamaian dan harmoni dalam masyarakat yang terpolarisasi.

b. Pemilihan dan kampanye politik

Pemilihan dan kampanye politik seringkali memanfaatkan isu-isu identitas sebagai alat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Identitas dapat mencakup berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Calon politik dan partai seringkali mencoba membangun narasi yang sesuai dengan identitas pemilih untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ini dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan pemilih yang merasa terwakili dan diinginkan oleh calon atau partai tersebut. Namun, pendekatan semacam itu juga memiliki potensi untuk menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

Polarisasi politik terjadi ketika isu-isu identitas digunakan untuk memisahkan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, dan ini dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan yang lebih tinggi dalam politik. Terlalu banyak penekanan pada politik identitas juga dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial, seperti ekonomi, pendidikan, dan kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemilih dan masyarakat untuk kritis dalam menganalisis bagaimana isu-isu identitas digunakan dalam pemilihan dan kampanye politik, serta untuk memastikan bahwa pemilihan dan dukungan mereka

didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang isu-isu tersebut, bukan hanya pada emosi atau identitas pribadi.

c. Sejarah Politik

Sejarah politik Indonesia memiliki akar yang dalam dalam era kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad. Kedatangan bangsa Eropa seperti Belanda diawali dengan perdagangan rempah-rempah dan kemudian berkembang menjadi kolonialisme yang brutal. Era kolonial ini memengaruhi pola politik identitas saat ini karena memaksa berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia untuk hidup bersama dalam satu wilayah yang diperintah oleh penjajah. Kolonialisme menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, serta merongrong struktur sosial tradisional, yang pada gilirannya menciptakan ketegangan etnis yang masih terasa hingga saat ini.

Selain itu, era konflik etnis di masa lalu, seperti konflik antara Jawa dan Madura, juga memiliki dampak signifikan dalam membentuk politik identitas saat ini. Konflik etnis ini sering kali dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan budaya, dan warisan konflik semacam itu masih dapat ditemukan dalam bentuk politik identitas yang kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Dampak-dampak sejarah kolonialisme dan konflik etnis ini menciptakan tantangan bagi Indonesia dalam membangun persatuan dan integrasi nasional yang inklusif. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia terus berusaha untuk mengatasi perpecahan ini dan mendorong perdamaian dan rekonsiliasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

d. Ketidakpuasan terhadap pemerintah

Ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat memicu penggunaan identitas kelompok sebagai alat perjuangan politik. Ketidakpuasan ini muncul ketika pemerintah dinilai gagal mengatasi isu-isu yang dianggap penting oleh kelompok tersebut, seperti hak-hak yang diabaikan atau isu-isu yang memiliki dampak besar pada kehidupan mereka. Dalam situasi semacam ini, kelompok tersebut mungkin merasa bahwa

pendekatan politik konvensional tidak efektif dan memilih untuk memanfaatkan identitas kelompok mereka untuk memobilisasi dukungan politik. Identitas kelompok dapat memperkuat solidaritas antar anggota kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Dengan mempromosikan isu-isu yang relevan dengan identitas kelompok mereka, mereka berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih besar untuk tuntutan mereka.

Namun, harus diingat bahwa ketidakpuasan yang signifikan terhadap pemerintah juga dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi berbagai kelompok serta berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk isu-isu yang mereka anggap penting. Selain itu, untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, partisipasi politik yang luas dan inklusi semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Memperkuat sistem demokrasi yang responsif dan terbuka dapat membantu mengatasi ketidakpuasan dan mengurangi potensi eskalasi konflik.

e. Media sosial dan teknologi

Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah fundamental cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di era modern. Media sosial adalah platform digital yang memberikan pengguna kemampuan untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan terhubung dengan orang lain secara daring. Hal ini telah membawa dampak besar terhadap dinamika ruang publik dan pola perilaku manusia. Media sosial memperluas ruang publik dengan memberikan platform inklusif bagi berbagai kelompok dan identitas, menciptakan ruang yang lebih demokratis dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Lebih dari itu, media sosial telah menjadi alat kuat untuk mobilisasi, memungkinkan kelompok dengan pandangan politik atau identitas yang serupa untuk terhubung dan membentuk komunitas online. Namun, dampak media sosial ini juga mencakup tantangan seperti konflik dan polarisasi,

penyebaran informasi yang salah, serta dampak negatif pada kesehatan mental dan privasi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang agar manfaatnya dapat dinikmati secara adil dan bertanggung jawab oleh seluruh masyarakat.

f. Pemimpin politik dan elit

Pemimpin politik dan elit seringkali menggunakan retorika identitas sebagai strategi komunikasi untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan politik. Dengan menonjolkan atau mengaitkan diri dengan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, atau kelompok sosial, pemimpin politik dapat memperkuat ikatan emosional dengan pendukung mereka dan memobilisasi massa yang memiliki identitas serupa. Penggunaan retorika identitas ini juga dapat memengaruhi masyarakat secara luas, karena pesan-pesan tersebut dapat mempengaruhi kesadaran kolektif. Ini bisa berujung pada polarisasi dan perpecahan sosial, dengan identitas menjadi dasar bagi pembedaan antara "kita" dan "mereka," sulitnya dialog, dan kesempatan rekonsiliasi yang berkurang. Selain itu, retorika identitas juga dapat menciptakan sentimen anti-elit dan anti-establishment, dengan pemimpin politik menggambarkan diri mereka sebagai "rakyat biasa" yang berjuang melawan elit yang mendominasi.

Namun, dalam konteks politik yang semakin kompleks, masyarakat perlu mampu mengenali upaya pemimpin politik dalam memanfaatkan retorika identitas. Memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan kebijakan dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih berdasarkan data daripada terjebak dalam perang retorika identitas yang berpotensi merugikan dan memecah-belahkan. Seiring berjalannya waktu, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari politik identitas dan mencari solusi yang mempromosikan persatuan dan pemahaman antar kelompok dalam masyarakat.

g. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah fenomena yang terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya di masyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses ke layanan publik, dan partisipasi politik. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk perasaan terpinggirkan di kalangan kelompok yang kurang beruntung, meningkatnya polarisasi politik, dan munculnya politik identitas. Dampak-dampak ini dapat menghambat kemajuan sosial dan memecah-belah masyarakat. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, dibutuhkan pendekatan inklusif dan berkeadilan yang fokus pada pembangunan sosial berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dialog antar kelompok, dan kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan harmoni sosial..

h. Nasionalisme dan sentimen anti-globalisasi

Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan pentingnya identitas nasional dan kesetiaan terhadap bangsa. Ini membangun rasa solidaritas di antara warga negara dengan menyoroti aspek budaya, etnis, atau agama yang membedakan satu bangsa dari yang lain. Sentimen nasionalisme seringkali muncul sebagai respons terhadap dampak globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi, melalui interaksi ekonomi, sosial, dan politik antarnegara, sering kali mempengaruhi budaya dan identitas nasional, yang dianggap sebagai ancaman oleh beberapa kelompok di masyarakat.

Dalam situasi ini, kelompok-kelompok yang merasa terancam dapat meningkatkan nasionalisme untuk mempertahankan identitas nasional mereka dan menjaga kedaulatan bangsa dari pengaruh eksternal. Hal ini bisa tercermin dalam dukungan terhadap kebijakan proteksionisme, penolakan terhadap arus migrasi, atau upaya untuk memperkuat bahasa dan tradisi nasional. Namun, perlu diingat bahwa

nasionalisme yang ekstrem atau eksklusif bisa memiliki dampak negatif, seperti konflik internal dan ketegangan antarnegara.

Untuk mengatasi sentimen nasionalisme yang berpotensi merugikan, penting untuk mengedepankan dialog, toleransi, dan pemahaman terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung manfaat globalisasi sambil tetap menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama di dalam negeri. Dengan pendekatan yang bijaksana, nasionalisme dapat berfungsi sebagai kekuatan positif yang mempersatukan warga negara dan memperkuat identitas nasional tanpa menutup diri dari dunia luar.

i. Isu-isu Kontroversial

Isu-isu sosial dan budaya kontroversial seperti hak-hak LGBT, imigrasi, dan isu-isu keagamaan telah menjadi fokus utama dalam politik identitas dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan mengenai isu-isu ini mencerminkan perbedaan yang mendalam dalam pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Hak-hak LGBT, sebagai salah satu isu kontroversial utama, mencerminkan perjuangan untuk mengakui dan melindungi hak individu dengan orientasi seksual dan identitas gender non-normatif. Sementara gerakan ini semakin kuat, masih banyak ketidaksetujuan dan perlawanan terhadap hak-hak LGBT, terutama karena pandangan tradisional, nilai-nilai agama, atau kepercayaan tertentu yang memandangnya sebagai hal yang tidak benar atau tidak alami.

Isu imigrasi juga memicu kontroversi di banyak negara, dengan perdebatan yang berkisar pada batas-batas negara dan penerimaan terhadap imigran. Sisi positif mencakup ide keberagaman budaya dan potensi kontribusi positif yang dapat dibawa oleh imigran. Namun, kekhawatiran terhadap masalah ekonomi, keamanan, dan dampak pada layanan publik sering kali mendorong sikap ketidaksetujuan terhadap imigrasi. Isu-isu keagamaan, yang melibatkan hak kebebasan beragama dan perbedaan keyakinan, juga memicu perdebatan intens di

masyarakat yang beragam agama. Di beberapa negara, perbedaan agama dapat mengakibatkan ketegangan antar-kelompok dan bahkan konflik sosial yang serius. Politik identitas sering digunakan oleh partai dan pemimpin politik untuk memanfaatkan isu-isu ini guna membangun dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki pandangan serupa, yang dalam beberapa kasus berujung pada polarisasi dan pembelahan masyarakat.

14. Dampak negatif dari Politik Identitas terhadap Konsolidasi Demokrasi saat ini yang cenderung menggoyahkan keutuhan NKRI

Konsolidasi demokrasi adalah proses penggabungan beberapa elemen demokrasi yang berbeda untuk menciptakan kesatuan dan memfasilitasi demokratisasi politik. Menurut pandangan Huntington, konsolidasi demokrasi mencerminkan kondisi di mana sistem demokrasi telah berhasil mengembangkan dan membangun institusi-institusi demokrasi yang kokoh serta mencapai kesepakatan politik yang luas di antara berbagai aktor politik. Selain itu, dalam demokrasi yang terkonsolidasi, kehidupan politik yang stabil dan berkelanjutan juga menjadi salah satu indikator utama. Pandangan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara yang telah mengadopsi sistem demokrasi sejak tahun 1998, menghadapi tantangan dalam mencapai konsolidasi demokrasi yang lebih mendalam. Meskipun telah melakukan langkah-langkah untuk membangun institusi-institusi demokrasi, seperti pemilihan umum dan sistem pemerintahan yang inklusif, negara ini masih menghadapi beberapa hambatan dalam proses konsolidasi. Salah satunya adalah adanya tingkat korupsi yang masih cukup tinggi, menghambat efektivitas institusi dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, ketimpangan sosial-ekonomi juga merupakan tantangan serius dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disparitas dalam hal pendapatan, akses terhadap pendidikan, dan layanan publik dapat menciptakan perpecahan dan konflik sosial yang merongrong stabilitas politik. Perlambatan dalam reformasi institusi-institusi demokrasi, seperti sistem

peradilan yang mandiri dan lembaga anti-korupsi yang lebih efektif, juga menjadi faktor yang memperlambat proses konsolidasi demokrasi.

Unsur-unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi meliputi lembaga atau institusi politik, termasuk partai politik, elite politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat politik. Pentingnya kesepakatan bersama mengenai "nilai-nilai politik" juga menjadi unsur kunci dalam konsolidasi demokrasi. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendekatkan berbagai elemen politik dan membentuk kekuatan yang bersatu selama periode transisi menuju demokrasi.

Pandangan Samuel Huntington tentang konsolidasi demokrasi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Indonesia saat ini. Konsolidasi demokrasi adalah tahap perkembangan demokrasi di mana negara telah berhasil membangun institusi-institusi demokrasi yang kuat dan mencapai kesepakatan politik yang luas di antara berbagai aktor politik. Pandangan ini dapat dianalisis dalam beberapa aspek terkait dengan kondisi Indonesia saat ini.

Pertama, institusi-institusi demokrasi yang kokoh adalah aspek penting dalam konsolidasi demokrasi. Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal ini sejak transisi demokrasi pada tahun 1998. Pemilihan umum yang rutin diselenggarakan, keberadaan lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum adalah bukti dari pembangunan institusi-institusi demokrasi yang cukup kokoh. Namun, masih ada tantangan dalam memperkuat independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini, serta memastikan mereka berfungsi dengan baik.

Kedua, kesepakatan politik yang luas di antara berbagai aktor politik adalah tantangan yang terus dihadapi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat polarisasi politik yang cukup tajam di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum dan isu-isu keagamaan. Untuk mencapai konsolidasi demokrasi, perlu ada upaya untuk membangun konsensus politik yang lebih luas, mengatasi polarisasi, dan memastikan bahwa partisipasi politik yang beragam dapat diterima dan dihormati.

Ketiga, kehidupan politik yang stabil dan berkelanjutan adalah indikator penting dalam konsolidasi demokrasi. Indonesia telah mengalami berbagai gejolak politik dalam sejarahnya, termasuk konflik etnis dan agama, serta perubahan pemerintahan. Meskipun situasi politik saat ini relatif stabil, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial masih ada. Untuk mencapai konsolidasi demokrasi, penting untuk terus bekerja menuju kestabilan politik yang berkelanjutan.

Sedangkan Menurut Cornel West dalam karyanya "Race Matters" (1993), konsolidasi demokrasi menawarkan perspektif yang berbeda. Pandangan Cornel West tentang konsolidasi demokrasi membawa perspektif yang lebih luas dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurut West, konsolidasi demokrasi bukan hanya tentang pembangunan lembaga-lembaga politik formal, tetapi juga tentang partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Pandangan ini dapat dihubungkan dengan situasi di Indonesia dalam beberapa cara.

Pertama, partisipasi aktif masyarakat adalah elemen kunci dalam konsolidasi demokrasi menurut West. Di Indonesia, terdapat semangat demokrasi yang kuat, yang tercermin dalam tingginya partisipasi dalam pemilihan umum dan aksi-aksi protes yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Namun, tantangan terletak dalam memastikan bahwa partisipasi ini lebih dari sekadar pemilihan umum, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik sehari-hari, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, aspek budaya politik menjadi penting dalam pandangan West. Di Indonesia, beragam budaya dan identitas etnis, agama, dan budaya politik berperan dalam proses demokratisasi. Penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia diakui dan dihormati dalam konteks budaya yang beragam ini. Terutama, perlu ada upaya untuk mengatasi diskriminasi dan konflik yang mungkin timbul karena perbedaan budaya atau agama.

Ketiga, West menyoroti pentingnya inklusi sosial dan keadilan dalam konsolidasi demokrasi. Di Indonesia, masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap menjadi tantangan besar, terutama dalam hal akses terhadap

pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang sejati, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan bahwa semua warga negara merasakan manfaat dari demokrasi.

Dalam keseluruhan, pandangan Cornel West tentang konsolidasi demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, budaya politik, inklusi sosial, dan keadilan dalam membangun demokrasi yang kuat. Dalam konteks Indonesia saat ini, upaya untuk meningkatkan partisipasi, menghormati beragam budaya politik, dan mengatasi ketidaksetaraan akan membantu mencapai konsolidasi demokrasi yang lebih kokoh dan inklusif.

Kedua pandangan ini berpotensi saling melengkapi dalam konteks politik identitas di Indonesia. Pendekatan Huntington yang berfokus pada stabilitas dan dukungan internasional dapat memberikan dasar yang kuat bagi pendekatan West yang mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Keduanya dapat bekerja bersama dalam membangun lembaga-lembaga demokratis yang kuat, sambil memastikan inklusi dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Melalui pendekatan yang holistik ini, Indonesia dapat mengelola politik identitas dengan cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif, memperkuat dasar-dasar demokrasi dan menjaga stabilitas dalam masyarakat yang beragam.

Politik identitas adalah fenomena di mana kelompok-kelompok masyarakat berbasis identitas, seperti etnis, agama, ras, atau gender, memperjuangkan kepentingan dan tujuan politik mereka berdasarkan identitas tersebut. Meskipun beberapa bentuk politik identitas dapat memberikan dukungan bagi kesetaraan dan representasi bagi kelompok yang terpinggirkan, namun politik identitas juga dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap konsolidasi demokrasi, terutama jika tidak dikelola dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa dampak negatif politik identitas terhadap konsolidasi demokrasi, terutama di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beragam:

a. **Polarisasi politik**

Politik identitas cenderung meningkatkan polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat, karena mempertajam perbedaan dan

menyebabkan persaingan yang lebih intens antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas telah menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada polarisasi yang meningkat di kalangan masyarakat. Saat politik identitas mendominasi ranah politik, perbedaan antara kelompok-kelompok masyarakat menjadi semakin tajam. Orang-orang mulai mengidentifikasi diri mereka lebih kuat dengan kelompok identitas tertentu seperti etnis, agama, orientasi seksual, atau latar belakang budaya, dan hal ini bisa menyebabkan peningkatan kesadaran atas perbedaan di antara mereka. Dalam politik identitas, persaingan antara kelompok-kelompok ini seringkali menjadi lebih intens. Masing-masing kelompok berusaha mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, yang sering kali bertentangan dengan kelompok lain. Hasilnya, perpecahan dan konflik antara kelompok-kelompok ini dapat memperdalam polarisasi di masyarakat.

Salah satu konsekuensi negatif dari polarisasi politik identitas adalah munculnya dukungan politik yang berdasarkan kesetiaan identitas, bukan pada dasar ideologi atau visi politik yang jelas. Orang-orang cenderung mendukung partai atau kandidat karena mereka mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan secara kritis ideologi atau platform politik yang diajukan. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan politik yang tidak rasional dan mengurangi ruang untuk debat rasional dan diskusi berbasis fakta. Akibatnya, kesulitan muncul dalam mencapai kesepakatan dan konsensus yang diperlukan untuk memajukan konsolidasi demokrasi. Ketika masyarakat terpecah belah oleh perbedaan identitas dan polarisasi yang tajam, proses pembuatan keputusan menjadi lambat dan terhambat. Negosiasi dan kompromi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan bersama sering kali menjadi sulit karena kesetiaan yang lebih tinggi terhadap identitas kelompok daripada kepada tujuan bersama sebagai negara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencari persamaan dan dialog yang inklusif di atas perbedaan identitas. Pemimpin politik juga memiliki peran krusial dalam meredam polarisasi

dan mengedepankan politik yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Dengan mengedepankan visi politik yang inklusif dan berfokus pada kepentingan bersama, diharapkan dapat mencapai kesepakatan dan konsensus yang memperkuat konsolidasi demokrasi dan memajukan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

b. Meningkatnya Konflik Sosial

Politik identitas, yang mencakup pengelompokan masyarakat berdasarkan karakteristik khusus seperti etnis, agama, bahasa, gender, atau orientasi seksual, memiliki potensi untuk memperkuat pertentangan antara kelompok-kelompok identitas. Ketika politik identitas diambil dengan ekstremisme, ini dapat memicu konflik sosial yang berlarut-larut, mengganggu stabilitas politik dan sosial suatu negara, serta mengancam proses demokrasi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, politik identitas menjadi isu yang sangat sensitif. Untuk menjaga keutuhan NKRI, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi konflik sosial yang timbul dari politik identitas dengan cara bijaksana, seperti melalui dialog, pemahaman, partisipasi politik yang inklusif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keragaman identitas adalah aset berharga suatu bangsa, dan untuk menghindari konflik yang merusak, kita harus memperlakukan politik identitas dengan bijaksana. Dengan mengupayakan inklusi dan mencari kesepakatan di antara beragam kelompok identitas, kita dapat mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan harmoni dalam masyarakat. Meningkatkan pemahaman antarkelompok serta menghormati hak-hak individu dalam demokrasi adalah langkah-langkah kunci untuk mengatasi konflik sosial yang mungkin timbul akibat politik identitas. Dengan cara ini, kita dapat menjaga keutuhan NKRI dan mengambil manfaat dari keragaman yang ada untuk memperkuat negara secara keseluruhan.

c. Rendahnya solidaritas nasional

Rendahnya solidaritas nasional dapat disebabkan oleh politik identitas yang berlebihan dalam suatu negara. Politik identitas adalah praktek politik yang memanfaatkan perbedaan-perbedaan dalam identitas kultural, agama, etnis, atau gender untuk memperoleh dukungan politik. Ketika politik identitas menjadi dominan, hal ini dapat mengaburkan kesatuan nasional yang penting untuk konsolidasi demokrasi. Para pemimpin politik yang memanfaatkan politik identitas seringkali memperkuat perbedaan antar-kelompok dengan tujuan memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar-kelompok, mengancam keutuhan negara.

Rendahnya solidaritas nasional juga dapat mengurangi dukungan terhadap ideologi kesatuan. Ketika masyarakat terpecah-belah oleh politik identitas, individu-individu cenderung lebih fokus pada kepentingan kelompok mereka sendiri daripada pada kepentingan nasional. Ini dapat mengakibatkan penurunan dukungan terhadap prinsip-prinsip kesatuan yang mendasari negara tersebut, seperti supremasi hukum dan konstitusi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya untuk membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang stabil dan inklusif, karena solidaritas nasional yang kuat adalah fondasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan koherensi dalam suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengelola politik identitas dengan bijak agar tidak merusak solidaritas nasional yang esensial bagi konsolidasi demokrasi.

d. Manipulasi politik dan fragmentasi negara

Politik identitas adalah fenomena yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai strategi untuk mencapai tujuan politik mereka. Manipulasi politik identitas dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ketika politisi atau kelompok kepentingan menggunakan retorika atau tindakan yang memperkuat ikatan dengan kelompok

identitas tertentu, mereka dapat memicu ketegangan antar-kelompok, memperdalam perpecahan sosial, dan memicu konflik. Ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi, karena perhatian teralihkan dari isu-isu substansial yang berkaitan dengan kesejahteraan publik.

Selain itu, politik identitas yang berlebihan juga dapat mengganggu mekanisme demokrasi. Ketika politisi fokus pada pembakaran isu-isu identitas, pemilih dapat teralihkan dari isu-isu kebijakan yang lebih mendasar. Ini dapat mengakibatkan keputusan politik yang kurang berdasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan publik, karena terlalu banyak ditentukan oleh faktor identitas. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk perdebatan terbuka dan pengambilan keputusan yang adil dapat terkikis, dan masyarakat menjadi lebih terpecah-belah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemimpin politik untuk mewaspadaikan manipulasi politik identitas dan memprioritaskan persatuan dan stabilitas sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

e. **Mengabaikan isu-isu penting yang lebih luas**

Fokus yang berlebihan pada politik identitas dapat memaksa isu-isu kritis yang memengaruhi seluruh masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, untuk terabaikan. Politik identitas seringkali memicu perdebatan yang sangat emosional dan polarisasi di antara kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya atau nilai yang berbeda. Ini dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang mungkin lebih mendesak. Misalnya, dalam situasi di mana politik identitas mendominasi, isu-isu ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, dan pengangguran dapat terabaikan. Pendidikan yang berkualitas, yang seharusnya menjadi prioritas bagi setiap masyarakat, juga bisa terpinggirkan. Hal ini juga berlaku untuk isu-isu kesehatan, di mana upaya peningkatan sistem kesehatan dan

penanganan pandemi bisa terhambat oleh perdebatan politik yang terlalu terfokus pada identitas.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengakuan terhadap identitas yang berbeda adalah bagian integral dari masyarakat yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, keseimbangan menjadi kunci. Politik identitas perlu diakui, tetapi juga perlu diupayakan agar isu-isu kritis yang memengaruhi seluruh masyarakat tetap mendapatkan perhatian yang pantas. Hanya dengan menjaga keseimbangan ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang efektif dan menyeluruh yang meningkatkan kesejahteraan bersama.

f. **Rendahnya partisipasi politik**

Politik identitas dapat mengakibatkan alienasi di antara kelompok-kelompok yang merasa tidak terwakili atau diabaikan oleh pemerintah. Rendahnya partisipasi politik menjadi isu serius, ketika kelompok-kelompok tersebut merasa eksklusif dari proses politik, menghasilkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan pemimpin, serta mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Perasaan tidak berdaya juga mungkin muncul, di mana kelompok-kelompok ini merasa tidak memiliki pengaruh atau kekuatan untuk mengubah situasi politik mereka. Politik identitas juga berdampak pada kurangnya representasi yang memadai dalam sistem politik, dengan kelompok-kelompok yang merasa diabaikan merasa bahwa partisipasi politik tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Stereotip dan diskriminasi dapat menyulitkan partisipasi mereka dalam proses politik, mengancam inklusifitas dan akuntabilitas demokrasi. Demokrasi yang inklusif dan akuntabel harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan merasa dihargai serta diakui. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah politik identitas yang menyebabkan alienasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang aktif dan beragam.

g. Menurunkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi

Politik identitas yang disalahgunakan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama memiliki dampak serius pada lembaga-lembaga demokrasi dan sistem politik secara keseluruhan. Salah satu konsekuensinya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Ketika politik identitas digunakan untuk memihak satu kelompok, hal ini menciptakan persepsi bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak lagi bertindak secara netral dan inklusif. Kepercayaan ini adalah pilar utama dari demokrasi yang sehat, dan jika tergerus, itu dapat merusak integritas dan legitimasi lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, politik identitas yang tidak bertanggung jawab dapat menghambat partisipasi politik masyarakat. Ketika warga merasa bahwa sistem politik tidak mewakili kepentingan mereka dengan adil, mereka mungkin cenderung mundur dari proses politik. Hal ini dapat menghasilkan rendahnya tingkat pemilih, yang pada akhirnya mengurangi representativitas hasil pemilihan dan mengancam demokrasi itu sendiri.

Dampak lain dari politik identitas yang disalahgunakan adalah polarisasi yang semakin memburuk. Ketika politik dipusatkan pada perbedaan identitas dan kelompok, konflik antar kelompok dapat meningkat, menyulitkan pencarian kesepakatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan politik secara efektif. Ini dapat mengakibatkan kemacetan politik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pada tingkat yang lebih luas, penurunan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi dapat mengancam konsolidasi demokrasi itu sendiri. Kepercayaan yang rendah terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat membuka pintu bagi gangguan dan ketidakstabilan dalam sistem politik, yang pada gilirannya dapat mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa politik identitas digunakan dengan tanggung jawab dan dengan

mempertimbangkan kepentingan bersama agar demokrasi tetap kokoh dan berfungsi dengan baik.

15. Strategi dan Upaya yang dilakukan untuk Meminimalisir Dampak Negatif dari Politik Identitas guna mewujudkan Konsolidasi Demokrasi sehingga dapat memperkuat keutuhan NKRI

Konsolidasi demokrasi dalam konteks Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, merujuk pada usaha memperkuat fondasi demokrasi yang sudah ada, dengan fokus pada stabilitas politik dan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal. Dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsolidasi demokrasi mengimplikasikan penguatan sistem politik inklusif yang mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di dalam negeri, serta memastikan partisipasi yang merata. Cornel West menambahkan dimensi keadilan sosial dan partisipasi aktif warga negara sebagai elemen penting dalam mengokohkan demokrasi dan keutuhan NKRI. Mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk disparitas ekonomi, sosial, dan politik antarwilayah, menjadi kunci untuk mencegah ketegangan dan konflik internal. Investasi dalam pendidikan dan kesadaran politik juga sangat relevan, karena dapat mengurangi manipulasi politik, disinformasi, dan polarisasi yang mengancam stabilitas NKRI. Dengan demikian, konsolidasi demokrasi yang berfokus pada inklusi, keadilan, dan pendidikan adalah fondasi yang kuat untuk memperkuat kesatuan nasional Indonesia.

Menurut Larry Diamond (2000), esensi dari konsolidasi demokrasi adalah menciptakan legitimasi yang kuat terhadap sistem demokrasi. Legitimasi ini merujuk pada keyakinan yang tumbuh di kalangan para elit politik dan warga negara bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, dan aturan-aturan yang mengatur demokrasi adalah satu-satunya cara yang sah untuk memperoleh kekuasaan politik. Diamond menggarisbawahi bahwa legitimasi ini harus bertahan bahkan dalam kondisi politik dan ekonomi yang buruk, sehingga mayoritas rakyat tetap percaya bahwa perubahan politik harus dilakukan melalui prosedur demokratis. Oleh

karena itu, konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari sekadar pemilihan umum.

Diamond mengusulkan beberapa agenda penting untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pertama, penting untuk memperluas akses warga negara terhadap sistem peradilan dan membangun aturan hukum yang efektif (*rule of law*). Ini akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Kedua, kontrol terhadap korupsi politik harus ditingkatkan agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Ketiga, badan legislatif perlu diberdayakan dengan kekuatan untuk membuat undang-undang, melakukan investigasi, serta menjadi entitas yang profesional dan independen.

Keempat, desentralisasi kekuasaan negara dan penguatan pemerintahan daerah diusulkan oleh Diamond untuk membuat demokrasi lebih responsif terhadap berbagai kepentingan di seluruh wilayah negara. Kelima, pentingnya partai politik yang mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan personal para politisi. Keenam, masyarakat sipil dan media yang independen harus dibangun sebagai kekuatan penyeimbang untuk memelihara modal sosial, meningkatkan partisipasi warga negara, dan membatasi serta memperkuat kewenangan negara sesuai konstitusi. Terakhir, Diamond menyoroti pentingnya pendidikan warga yang memfokuskan pada partisipasi, toleransi, nalar, moderasi, dan kemampuan untuk berkompromi, sebagai ciri kewarganegaraan yang demokratis.

Dalam pandangan Diamond, konsolidasi demokrasi adalah proses jangka panjang yang melibatkan pembangunan institusi dan nilai-nilai demokratis yang kuat, serta pengembangan kesadaran dan partisipasi warga negara. Agenda-agenda yang diusulkannya mencerminkan upaya untuk memperkuat dasar-demokrasi dan meminimalkan potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas sistem demokratis.

Dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari politik identitas dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi mengacu pada pandangan Huntington, Cornel West, dan Larry Diamond (2000). Huntington memperingatkan bahwa politik identitas, yang mendasarkan

pengorganisasian pada faktor-faktor seperti agama, etnisitas, atau budaya, dapat memicu konflik yang merusak kesatuan nasional. Untuk mengatasi ini, perlu dibangun mekanisme inklusif yang mampu mengakomodasi keragaman identitas tanpa mengorbankan persatuan nasional. Ini dapat dicapai melalui pendekatan kebijakan yang mendorong partisipasi dan integrasi lintas-identitas dalam proses politik.

Cornel West menggarisbawahi perlunya keadilan sosial dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Politik identitas yang tidak seimbang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang memperkuat polarisasi masyarakat. West menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang adil bagi semua warga negara, sehingga identitas tidak lagi menjadi alat untuk memperoleh keuntungan politik atau ekonomi. Ini akan membantu mengurangi kemungkinan masyarakat terpecah-belah oleh politik identitas yang menekankan perbedaan daripada kesamaan.

Dalam konteks Indonesia, di mana politik identitas terkait dengan isu etnisitas, agama, dan ideologi, perlu diambil langkah-langkah konkret. Cornel West memandang bahwa upaya mencapai keadilan sosial merupakan cara untuk meredam potensi dampak negatif politik identitas. Dengan mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan keadilan bagi semua kelompok, motivasi untuk mengadopsi politik identitas secara berlebihan dapat ditekan.

Larry Diamond (2000) menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi dampak negatif politik identitas. Pertama, perlu dibangun pendidikan yang mendorong kesadaran lintas-identitas, menekankan nilai-nilai persatuan dan toleransi. Kedua, penguatan masyarakat sipil dan media independen akan membantu membatasi manipulasi politik identitas yang berpotensi merusak demokrasi. Ketiga, membangun partai politik yang mewakili beragam kepentingan, bukan hanya kepentingan tertentu, dapat membantu menghindari dominasi politik identitas yang merugikan.

Sedangkan, Menurut Donald L. Horowitz (1998), politik identitas dapat diilustrasikan sebagai suatu garis pemisah yang menentukan siapa yang diikutsertakan dan siapa yang dikecualikan dari suatu kelompok atau konstituensi politik. Politik identitas melibatkan upaya untuk mengendalikan siapa yang dianggap sebagai bagian dari kelompok yang diidentifikasi

berdasarkan atribut-atribut identitas tertentu, seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, dan lainnya. Dalam konteks ini, atribut-atribut identitas ini sering digunakan sebagai landasan untuk membangun solidaritas atau kesetiaan kepada kelompok tertentu, sambil secara implisit atau eksplisit membedakan antara mereka yang termasuk dan yang dikecualikan.

Politik identitas memiliki dampak yang signifikan pada dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Upaya untuk mengendalikan siapa yang dianggap sebagai anggota suatu kelompok identitas dapat menghasilkan pembatasan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok lain yang tidak memenuhi atribut identitas yang sama, sehingga dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan. Namun, dalam konteks demokratis yang inklusif, politik identitas juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadvokasi hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas yang sering diabaikan. Pemahaman ini mengilustrasikan bahwa aspek-aspek identitas individu dapat digunakan sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan kelompok serta mempengaruhi dinamika politik. Tantangan utama adalah mengelola politik identitas dengan bijak agar tidak mengancam persatuan dan stabilitas masyarakat dan negara, tetapi justru memberikan kontribusi positif terhadap pengakuan hak-hak dan pluralisme dalam kerangka demokrasi yang kuat. Pentingnya membangun fondasi demokrasi yang kuat menjadi sorotan dalam menghadapi dinamika politik yang berubah, mengingat politik identitas sering membawa implikasi merugikan seperti populisme berdasarkan sentimen agama, penindasan mayoritas terhadap minoritas, dan pemanfaatan politik identitas oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini harus diwaspadai sebagai tanda awal pelemahan fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah konteks politik identitas, penting untuk menjalankan politik identitas secara seimbang dan inklusif, mengingat keragaman sosial yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berikut beberapa strategi dan upaya apa sajakah yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari politik Identitas guna mewujudkan konsolidasi demokrasi sehingga dapat memperkokoh keutuhan NKRI, sebagai berikut :

a. **Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Politik**

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik bagi seluruh warga negara mengenai pentingnya fokus pada isu-isu substansial yang berdampak luas pada kehidupan mereka, daripada terjerat dalam politik identitas yang dapat memicu polarisasi.

Pemerintah dapat merevisi dan mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang mencakup isu-isu substansial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Ini dapat mencakup pendidikan tentang lingkungan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan isu-isu sosial yang mendalam. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

- 1) Memberikan pelatihan khusus kepada guru dan pendidik dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu substansial secara obyektif dan tidak memihak. Guru harus didorong untuk mendorong pemikiran kritis dan analitis bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut.
- 2) Pemerintah dapat mengadakan kampanye nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu substansial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kampanye ini dapat melibatkan iklan di media massa, acara pendidikan, dan forum diskusi publik.
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu penting. Pemerintah dapat menyelenggarakan forum terbuka, konsultasi publik, atau mengadakan mekanisme partisipatif lainnya untuk melibatkan warga negara dalam merumuskan kebijakan publik.
- 4) Pemerintah harus menyediakan data, laporan, dan informasi lainnya secara terbuka agar masyarakat dapat mengakses dan memahami isu-isu substansial dengan baik.
- 5) Pemerintah dapat menerapkan undang-undang yang mengatur pendanaan kampanye dan membatasi peran donasi politik yang tidak transparan.

- 6) Pemerintah harus mendukung media independen dan bertanggung jawab, yang memberikan liputan berimbang tentang isu-isu substansial. Ini membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang untuk membentuk opini mereka.
- 7) Pemerintah dapat menyelenggarakan dialog terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang kompleks dan beragam.

Melalui upaya-upaya ini, pemerintah dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, berdaya tahan, dan berpusat pada isu-isu substansial yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga dapat mengurangi polarisasi dan meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan politik.

b. **Penguatan Peran Media Independen**

Mendukung media independen yang obyektif dan profesional untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Media yang independen berperan penting dalam memberikan berita yang tidak cenderung memihak pada kelompok atau golongan tertentu, sehingga mengurangi potensi manipulasi politik identitas.

- 1) Pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan media independen. Kebijakan ini harus berfokus pada perlindungan kebebasan pers, kemudahan mendirikan media independen, dan dukungan finansial untuk media independen yang memenuhi standar tertentu.
- 2) Pemerintah dapat menyediakan sumber daya seperti akses ke informasi, data, dan narasumber yang relevan bagi media independen. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga penting untuk meningkatkan kualitas jurnalis dan staf media independen agar dapat memberikan informasi yang akurat dan berimbang.

- 3) Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama lembaga pemerintah lainnya dapat memberikan dukungan keuangan kepada media independen melalui program subsidi, hibah, atau pembebasan pajak tertentu. Insentif ini harus diberikan dengan transparan dan adil untuk memastikan bahwa media independen tidak tergantung pada kepentingan pihak lain.
- 4) Pemerintah dapat bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi dan memperkuat media independen. Kemitraan ini dapat membantu dalam memonitor dan melindungi kebebasan pers serta meningkatkan keberlanjutan media independen.
- 5) Pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam hubungannya dengan media independen. Ini termasuk memberikan akses yang adil dan setara terhadap informasi dan acara publik serta menghindari campur tangan dalam konten atau pemberitaan media.
- 6) Pemerintah harus memastikan keberlanjutan dan keamanan media independen dengan mengawasi perlindungan hukum yang memadai. Ini mencakup undang-undang yang melindungi kebebasan pers, hak untuk menjalankan bisnis media secara independen, serta perlindungan terhadap jurnalis dari ancaman atau tekanan politik.
- 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama lembaga pemerintah lainnya dapat melakukan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya media independen dalam memberikan informasi yang obyektif dan berimbang. Kampanye ini harus menekankan nilai-nilai kebebasan pers dan pentingnya mendukung media independen untuk keberagaman dan kualitas informasi.

Dengan melakukan upaya-upaya ini, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan lembaga pemerintah lainnya, dapat berperan aktif dalam mendorong penguatan media

independen yang obyektif, profesional, dan bertanggung jawab. Media independen yang kuat akan memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, serta mengurangi potensi manipulasi politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat.

c. Meningkatkan Kampanye Kesadaran Politik

Melakukan kampanye secara luas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik identitas dan bagaimana mengidentifikasi dan menanggapi retorika yang divisif. Kampanye ini dapat melibatkan partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan kesadaran politik yang lebih baik. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- 1) KPU dan Bawaslu dapat melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang pentingnya fokus pada isu-isu substansial daripada politik identitas dalam proses pemilu. Kampanye ini dapat mencakup penjelasan tentang dampak negatif politik identitas dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan program kerja.
- 2) Pemerintah dan parpol dapat mengadakan kampanye pendidikan politik yang berfokus pada isu-isu substansial yang relevan bagi masyarakat. Kampanye ini dapat melibatkan tokoh-tokoh akademisi, ahli, dan pemikir yang membahas isu-isu kritis secara obyektif.
- 3) KPU, Bawaslu, dan pemerintah dapat bekerja sama dalam kampanye untuk mengatasi penyebaran hoaks dan informasi palsu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik. Edukasi tentang cara mengidentifikasi berita palsu dan pentingnya mengandalkan sumber informasi yang terpercaya juga perlu disampaikan.
- 4) Pemerintah dan Parpol dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan forum terbuka tentang isu-isu politik. Ini memungkinkan masyarakat untuk berbicara langsung dengan

- pemimpin dan calon pemimpin untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang jelas tentang visi dan misi mereka.
- 5) Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan Parpol dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye kesadaran politik. Melalui media, pesan-pesan tersebut dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.
 - 6) Pemerintah dan lembaga terkait dapat melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan jangkauan yang luas untuk mendukung kampanye kesadaran politik. Mereka dapat menjadi duta kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang politik yang berpusat pada isu-isu substansial.
 - 7) Bawaslu dan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang tahapan pemilu, penggunaan dana kampanye, dan pengawasan pemilu, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat secara aktif dalam proses politik.
 - 8) Pemerintah dapat memasukkan materi pendidikan politik dan kesadaran politik ke dalam kurikulum pendidikan formal. Ini membantu menciptakan generasi yang lebih sadar dan kritis terhadap isu-isu politik.

Dengan melakukan upaya-upaya ini secara bersama-sama, pemerintah, KPU, Bawaslu, Parpol, dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan kesadaran politik yang lebih baik di masyarakat. Kampanye kesadaran politik yang luas dan holistik ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan mempromosikan fokus pada isu-isu substansial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

d. **Meningkatkan Keterbukaan dan Dialog**

Mendorong terbukanya dialog antar kelompok dan komunitas yang berbeda untuk mengatasi ketegangan dan miskomunikasi. Keterbukaan dan dialog adalah kunci dalam membangun pemahaman dan rasa saling menghargai di antara masyarakat yang beragam. Untuk mendorong keterbukaan dan dialog antar kelompok dan komunitas yang berbeda guna

mengatasi ketegangan dan miskomunikasi, pemerintah, partai politik, pimpinan LSM atau Ormas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Kampanye dan Edukasi tentang Pentingnya Keterbukaan dan Dialog: pemerintah, partai politik, LSM, Ormas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat melakukan kampanye dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keterbukaan dan dialog dalam memahami perbedaan dan mencari solusi bersama. Kampanye ini harus disertai dengan contoh-contoh nyata keberhasilan dialog dalam mengatasi masalah sosial dan politik.
- 2) Pembentukan Forum Dialog: Mereka dapat membentuk forum dialog yang melibatkan berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda, seperti forum lintas agama, forum lintas etnis, dan sejenisnya. Forum ini dapat menjadi wadah untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan mencari kesepahaman.
- 3) Penguatan Peran Media dan Teknologi: Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan keterbukaan dan dialog. pemerintah, partai politik, dan LSM dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa media memberikan ruang yang cukup untuk berbagai pandangan dan mempromosikan dialog yang sehat.
- 4) Pelibatan Aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Mereka dapat berperan sebagai mediator dalam proses dialog dan menciptakan iklim yang kondusif untuk dialog antar kelompok.
- 5) Pendekatan Kolaboratif dalam Penyelesaian Konflik: Pemerintah, partai politik, LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat dapat berkolaborasi dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan dialog dan negosiasi. Penerapan pendekatan ini harus diutamakan daripada menggunakan cara-cara yang konfrontatif.
- 6) Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Diplomasi: Masyarakat perlu diberdayakan dengan keterampilan komunikasi dan diplomasi

agar dapat berdialog secara efektif dan terbuka. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang ini.

- 7) Penerapan Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah dan partai politik harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan mewakili berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata.

Semua upaya ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan kerja sama yang baik dari semua pihak. Dengan mendorong keterbukaan dan dialog yang efektif, diharapkan ketegangan dan miskomunikasi antar kelompok dapat diatasi, dan masyarakat dapat tumbuh dalam pemahaman dan saling menghargai dalam keragaman.

e. **Meningkatkan Penegakan Hukum dan Pengawasan**

Memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap segala bentuk tindakan yang memicu polarisasi politik, diskriminasi, atau intoleransi. Pengawasan juga harus ditingkatkan untuk mencegah politikus yang memanfaatkan isu-isu identitas untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pembentukan kebijakan dan regulasi yang mengatur pencegahan dan penindakan politik identitas: Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang melarang politikus untuk memanfaatkan isu-isu identitas untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kebijakan ini harus diikuti oleh sanksi yang tegas jika ada politikus yang melanggar aturan ini.
- 2) Pengawasan terhadap kampanye politik: KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya kampanye politik, termasuk menyelidiki dan menindak tindakan kampanye yang menggunakan narasi yang memicu polarisasi, diskriminasi, atau intoleransi. Bawaslu juga harus secara aktif memantau iklan politik dan konten kampanye di media sosial untuk mengidentifikasi pelanggaran.

- 3) Edukasi dan kesadaran publik: Pemerintah, KPU, dan Bawaslu dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya polarisasi politik, diskriminasi, dan intoleransi yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Kampanye edukasi dapat dilakukan untuk mempromosikan pemahaman tentang pentingnya berpolitik secara adil dan tidak menggunakan isu-isu identitas sebagai alat untuk mencari keuntungan politik.
- 4) Pembentukan tim khusus penanganan kasus-kasus politik identitas: Polri dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli hukum dan analis keamanan untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus politik identitas yang muncul. Tim ini dapat berkolaborasi dengan Bawaslu dan institusi hukum lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.
- 5) Melibatkan pemangku kepentingan: Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan Polri harus aktif melibatkan pemangku kepentingan seperti LSM, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk memantau proses politik dan memberikan masukan yang objektif terkait pencegahan polarisasi politik dan penegakan hukum yang adil.
- 6) Penguatan independensi lembaga-lembaga terkait: Untuk memastikan proses pengawasan dan penegakan hukum yang transparan, lembaga-lembaga terkait harus memiliki independensi yang kuat dari intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip hukum dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

f. Mendorong penerapan kebijakan pemerintah yang inklusif, mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dan komunitas dalam Masyarakat

Dengan menerapkan kebijakan yang adil dan merata, pemerintah dapat mengurangi ketidakpuasan yang mungkin muncul dan menghindari konflik yang berbasis identitas. Untuk mendorong penerapan kebijakan pemerintah yang inklusif dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dan

komunitas dalam masyarakat, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Konsultasi dan partisipasi publik: Pemerintah harus secara aktif melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok dan komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui konsultasi dan partisipasi publik, pemerintah dapat memahami berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.
- 2) Analisis dampak kebijakan: Sebelum menerapkan kebijakan, pemerintah harus melakukan analisis dampak kebijakan yang komprehensif. Analisis ini harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dan mencari solusi yang lebih inklusif.
- 3) Pendekatan berbasis hak asasi manusia: Penerapan kebijakan yang berlandaskan hak asasi manusia adalah prinsip penting dalam menciptakan kebijakan inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas dan rentan.
- 4) Penguatan institusi inklusif: Pemerintah harus memastikan bahwa institusi-institusi publik memiliki keberagaman yang mewakili berbagai kelompok masyarakat. Institusi yang inklusif akan lebih mampu memahami dan mengakomodasi kepentingan semua komunitas.
- 5) Perkuat dialog antar-kelompok: Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan diskusi antara berbagai kelompok dan komunitas dalam masyarakat. Dialog ini dapat membantu membangun pemahaman, mengurangi prasangka, dan mencari titik-titik kesamaan untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 6) Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan

yang diambil dan siap untuk mendengarkan dan merespons masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

- 7) Pengarusutamaan isu-isu inklusif dalam program pembangunan: Pemerintah harus memastikan bahwa isu-isu inklusif menjadi bagian dari program pembangunan dan anggaran negara. Pengalokasian dana yang merata untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok akan membantu mengurangi disparitas sosial dan ekonomi.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan merata, sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan menghindari konflik yang berbasis identitas. Selain itu, kebijakan inklusif juga dapat memperkuat keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

g. **Meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyebaran konten politik yang provokatif di media sosial dan platform digital harus diperkuat. Langkah ini dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan merusak iklim politik yang harmonis. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPU, Bawaslu, dan pihak lainnya:

- 1) Perkuat kerja sama dengan platform digital: Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPU, dan Bawaslu dapat menjalin kerja sama dengan platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Kerja sama ini dapat mencakup pembentukan mekanisme cepat untuk melaporkan konten politik yang provokatif, serta memberikan pelatihan bagi pengguna platform digital untuk lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan konten politik.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan teknologi pemantauan: Pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu, dapat meningkatkan kapasitas dalam memantau konten politik yang beredar di media sosial dan platform digital. Pemanfaatan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan

dapat membantu mengidentifikasi konten provokatif secara lebih efisien.

- 3) Peningkatan sensitivitas algoritma platform: Platform digital harus memperkuat algoritma mereka untuk mendeteksi dan mengurangi penyebaran konten politik yang provokatif. Dengan meningkatkan sensitivitas algoritma, konten berbahaya dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani.
- 4) Edukasi untuk pengguna media sosial: Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat melakukan kampanye edukasi bagi pengguna media sosial untuk mengenali dan melaporkan konten politik yang provokatif. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan konten politik.
- 5) Pengawasan dan penindakan: Bawaslu dan instansi hukum lainnya harus aktif melakukan pengawasan terhadap konten politik yang provokatif dan menindak pelanggaran dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten politik yang merusak.
- 6) Melibatkan masyarakat dalam pengawasan: Selain pihak berwenang, masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan konten politik di media sosial. KPU dan Bawaslu dapat melibatkan masyarakat dalam melaporkan konten politik yang provokatif dan merusak melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
- 7) Pengembangan panduan pemberitaan dan etika politik: Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat membantu mengembangkan panduan pemberitaan dan etika politik untuk media massa dan platform digital. Panduan ini dapat mengarahkan media dan para politikus untuk menghindari konten provokatif yang dapat memicu perpecahan sosial.

Semua upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkoordinasi antara pemerintah, KPU, Bawaslu, platform digital, serta masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat,

diharapkan penyebaran konten politik yang provokatif dapat diminimalisir, sehingga iklim politik yang lebih harmonis dan sehat dapat tercipta.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara yang dibentuk dengan prinsip persatuan dan kesatuan yang kuat, yang tercermin dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945. Proses pembentukan NKRI melibatkan perjuangan berat dan kesepakatan antara para pendiri bangsa, dengan peristiwa bersejarah seperti perlawanan terhadap penjajah dan proklamasi kemerdekaan. Walaupun memiliki fondasi yang kokoh, NKRI tetap dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun dan mempertahankan konsolidasi demokrasi, terutama terkait dengan fenomena politik identitas yang bisa memiliki dampak yang bervariasi.
- b. Politik identitas di Indonesia adalah hasil dari berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Keanekaragaman budaya, agama, dan suku memunculkan identitas yang bersaing dalam politik, diperparah oleh polarisasi politik yang semakin tajam dan peran media sosial dalam menyebarkan pandangan identitas. Sejarah dan konflik masa lalu juga membentuk pandangan identitas masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, media sosial, pemimpin politik, serta kesenjangan sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong politik identitas. Ini bisa mendorong kelompok untuk menggunakan identitas kelompok sebagai alat perjuangan politik, sementara media sosial memfasilitasi mobilisasi kelompok dan pemimpin politik menggunakan retorika identitas untuk menggalang dukungan politik. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga memperburuk polarisasi politik dan memperkuat politik identitas.
- c. Politik identitas memiliki potensi untuk memperdalam konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif, dialog, dan kesadaran akan keberagaman identitas untuk mencapai perdamaian dan harmoni. Dalam menghadapi isu-isu

kontroversial, pemahaman, empati, dan upaya mencari solusi inklusif yang menghormati kebebasan individu, serta mempromosikan kesetaraan dan toleransi, menjadi kunci. Fenomena politik identitas, meskipun dapat mendukung kesetaraan, juga membawa dampak negatif seperti polarisasi politik, konflik sosial, manipulasi politik, dan rendahnya partisipasi politik.

- d. Dalam upaya membangun dan memperkuat demokrasi, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa politik identitas diintegrasikan secara seimbang dengan isu-isu kritis yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik secara menyeluruh untuk mengalihkan fokus masyarakat dari politik identitas ke isu-isu substansial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, memperkuat peran media independen dalam menyediakan informasi yang akurat dan berimbang, sehingga mengurangi potensi manipulasi politik identitas. Ketiga, mendorong kampanye kesadaran politik yang luas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik identitas dan cara mengidentifikasi retorika divisif. Keempat, mendorong terbukanya dialog antar kelompok dan komunitas untuk mengatasi ketegangan dan miskomunikasi, sehingga membangun pemahaman dan rasa saling menghargai dalam masyarakat yang beragam. Kelima, memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindakan yang memicu polarisasi, diskriminasi, atau intoleransi, serta menghindari politikus yang memanfaatkan isu-isu identitas untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Keenam, mendorong penerapan kebijakan inklusif dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dan ketujuh, meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyebaran konten politik yang provokatif di media sosial dan platform digital. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berfokus pada isu-isu substansial, dan demokrasi serta keutuhan NKRI dapat diperkuat. Dengan demikian, integrasi politik identitas dengan isu-isu kritis akan membantu menciptakan lingkungan demokratis yang lebih stabil dan inklusif.

17. Rekomendasi

- a. Pemerintah bersama sama dengan DPR serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menyusun peraturan yang membatasi penggunaan isu agama, etnis, dan suku dalam kampanye politik.
- b. Pemerintah memperkuat independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye yang merugikan prinsip demokrasi.
- c. Pemerintah dan DPR/MPR perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan dan memfasilitasi partisipasi publik. Ini akan membantu mengurangi rasa ketidakpuasan yang mendorong polarisasi.
- d. KPU, pemerintah, dan partai politik perlu bekerja sama untuk mengembangkan program literasi politik yang fokus pada nilai-nilai etika dan moral. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukatif, seminar, lokakarya, dan kampanye sosial yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam praktik politik.
- e. Pemerintah dan partai politik perlu mendorong calon pemimpin yang menunjukkan komitmen pada nilai-nilai moral dan integritas karena pemimpin yang memiliki kualitas ini cenderung lebih dapat dipercaya dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Proses seleksi calon pemimpin yang mempertimbangkan rekam jejak etis dan moral para kandidat akan membantu mengurangi risiko terpilihnya pemimpin yang berpotensi terlibat dalam tindakan korupsi atau perilaku tidak etis. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih akan lebih cenderung mengambil keputusan yang berlandaskan pada kepentingan umum dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
- f. Perlunya kolaborasi antara KPU, Pemerintah, dan Partai Politik dalam mengadakan acara untuk mempromosikan pemahaman tentang nilai multikulturalisme dan keragaman dapat sangat bermanfaat. KPU dapat menyediakan platform netral sebagai penyelenggara, sementara Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan fasilitas. Partai Politik dapat membantu dalam merancang konten acara yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas, serta berpartisipasi aktif

dalam diskusi dan presentasi. Dengan kerja sama ini, mereka bisa memberikan teladan yang kuat bagi masyarakat dalam membangun rasa saling menghargai, toleransi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya, agama, dan pandangan dalam masyarakat kita.

- g. KPU dan Bawaslu perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terenkripsi, seperti formulir online atau hotline. Saluran ini harus dapat diakses secara anonim untuk melindungi identitas pelapor. Selain itu Penting bagi KPU dan Bawaslu untuk menjamin bahwa pelapor akan mendapatkan perlindungan terhadap potensi tindakan balasan atau represi. Pelapor juga sebaiknya mendapatkan pendampingan hukum jika diperlukan.
- h. Meningkatkan kerja sama antara KPU, Bawaslu, pemerintah, dan partai politik dengan lembaga penegak hukum dalam rangka memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan tindakan korupsi dalam politik. Kolaborasi yang erat akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta memberikan efek jera kepada pelanggar. Dengan transparansi dalam proses penyelidikan dan pengadilan, integritas sistem politik dapat ditingkatkan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan pemilihan yang adil dan bersih.
- i. Kampanye politik berbasis ide perlu ditekankan dengan kesepakatan dari penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan aktor politik untuk fokus pada gagasan esensial dan mencegah perburukan perbedaan. Meskipun tantangan pragmatisme politik ada, pendekatan ini bisa menjadi eksperimen sosio-politis untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan politik yang kacau akibat kampanye yang tidak tepat sasaran. Penting untuk menghindari politik uang dan sentiment agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dan konflik. Tim kampanye dari setiap kandidat perlu bertanggung jawab penuh dalam mengontrol manajemen isu kampanye, untuk menghindari distorsi informasi dan kampanye liar di media sosial.

Dengan pengawasan ketat dan koordinasi yang baik antara tim kampanye, diharapkan integritas proses pemilu tetap terjaga dan penyebaran informasi yang tidak akurat dapat dicegah.

Jakarta, 29 Agustus 2023

Penulis



Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E.
Brigadir Jenderal TNI



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku dan Jurnal Penelitian

Amy Chua, dalam bukunya *Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations* (2018).

Cressidal Heyes. 2007. *Identity Politic*. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haboddin, M. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126.

Huntington, Samuel. P. 1983. *Tertib Politik di dalam masyarakat yang sedang berubah*. Rajawali Pers. Jakarta.

Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics." Verso, 1985.

Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (alih bahasa Tim Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta: IRE Press, 2003, h.84.

Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy", New York: Farrar, Strauss and Giroux (2014)

Maarif, A. S. (2017). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.

Mahpudin. 2019. *Demokrasi Dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru*. *International Journal of Demos* Vol. 1, Issue 1, April 2019.

O'Donnel, Guillermo dan Schmitter, Phillippe C. 1993. Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta: LP3ES. 24-6.

Richard Thomson Ford, "Political Identity as Identity Politics", dalam UNBOUND, Vol. 53 No. 1, hlm. 53-57.

Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2023. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas RI.

Stoner, James A.F. 2011. Manajemen Jilid 1 Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Gramedia.

West, Cornel. 1993. Race Matters. Vintage Books.

Rujukan Elektronik

<https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/warning-waspada-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-identitas-menuju-pemilu-presiden> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB

<https://www.kontenpedia.com/detail/news/500899/politik/politik-identitas-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/13/080000469/8-definisi-demokrasi-menurut-ahli?page=all> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-bf62f03e3f409a9491f3d31fea24a03c.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://edubirdie.com/examples/race-matters-by-cornel-west-racism-in-america/> diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024> diakses pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 20.45 WIB.

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-punya-17001-pulau-pada-2022-paling-banyak-di-mana> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Pemilih Muda Jadi Sasaran Partai Politik di Pemilu 2024 - Tribun-timur.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 20.00 WIB

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks->

demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/yogyakarta-kantongi-skor-indeks-demokrasi-indonesia-tertinggi-2022> diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html> diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.

<https://www.bps.go.id/publication/2022/06/30/6a2dabc16d556ab9d075f918/statistik-sosial-budaya-2021.html> diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 21.30 WIB.

<https://validnews.id/nasional/Intoleransi-Jadi-Problem-Bersama-ASEAN-ZWa> diakses pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

The Clash Of Civilization: Sebuah Pemetaan Konflik Dunia | Celotehque's Blog (wordpress.com) diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/luncurkan-indeks-kerawanan-pemilu-2024-bawaslu-harap-semua-daerah-tetap-kondusif> diakses pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 21.00 WIB

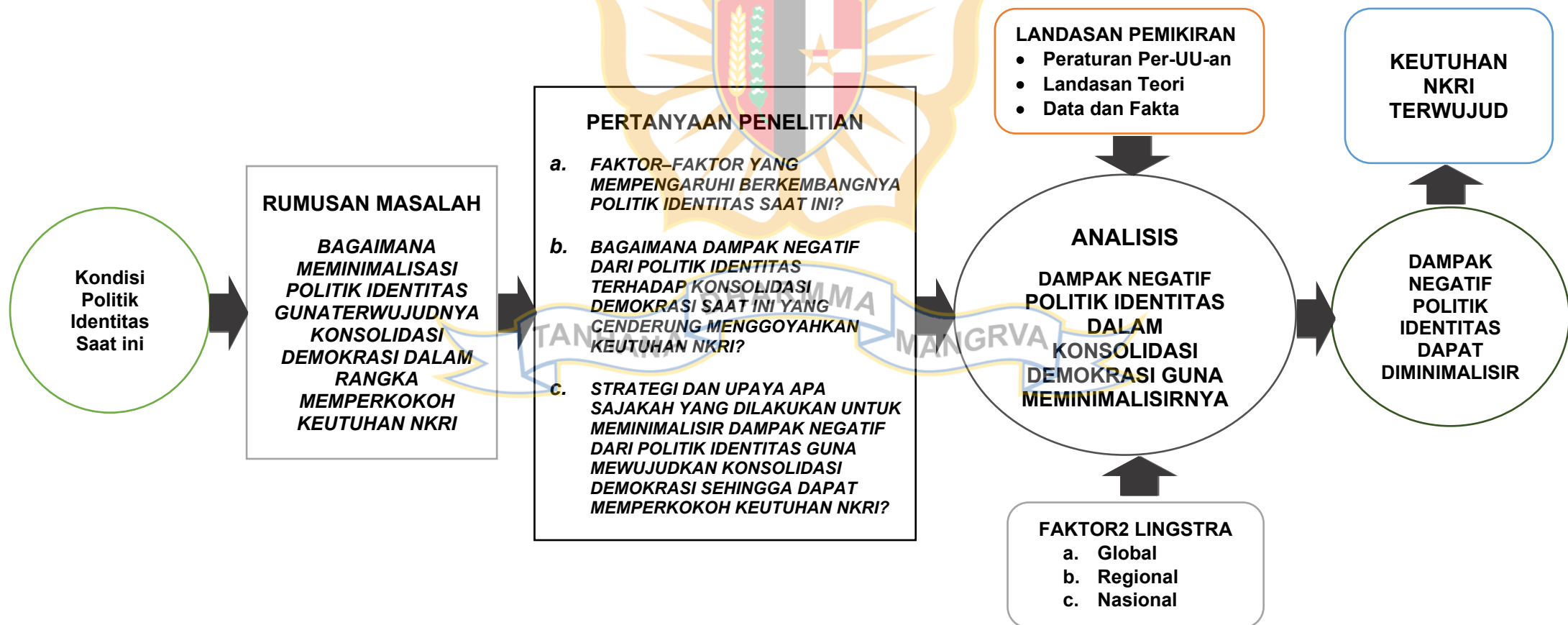
Huntington: Dari Keteraturan ke Demokrasi (freedom-institute.org) diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB

[7. BAB II \(1\).pdf \(uin-suska.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 21.20 WIB.



ALUR PIKIR

MEMINIMALISASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS GUNA TERWUJUDNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA POKOK

1 Nama	: Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E. Protestan	6 Kesatuan	: TNI AD	12 No. Asabri	: -
2 Pangkat/Korps	: Brigjen TNI	7 Kategori	: Aktif	13 Agama	:
3 NRP/NBI	: 11930071330669	8 TMT TNI	: 24-07-1993	14 Status kawin	: K-3
4 Jabatan	: Staf Khusus Kasad	9 Jenis kelamin	: Pria	15 Gol. Darah	: O
5 TMT Jabatan	: 29-03-2023	10 Suku bangsa	: Minahasa	16 Baju/celana	: L/33
		11 Tempat, tgl. lahir	: Banjarmasin, 04-6-1969	17 Sepatu/topi	: 42/57

II. PENDIDIKAN

UMUM

1 SD	Th 1983
2 SMP	Th 1986
3 SMA	Th 1989
4 S-1	Th 2013

MILITER

DIKTUK/DIKBANGUM

1 Akmil	Th 1993
2 Sussarcabif	Th 1994
3 Selapaif	Th 2004
4 Seskoad	Th 2008
5 Lemhannas RI	Th 2023

DIKBANGSPES

1 Dik Para Dasar	Th 1994
2 Dik Komando-LXVI	Th 1995
3 Sus GLG	Th 1998
4 KIBI-XLIX	Th 1999
5 Sus Papan	Th 2000
6 Sussarpa Intel-XLV	Th 2001
7 Tartih Kopassus	Th 2001
8 Dik Sandha	Th 2005
9 Sus Dandim	Th 2011
10 Suspa Intelstrat Tk-1	Th 2013
11 Intelligece Director Course, London	Th 2016

III. KECAKAPAN BAHASA

ASING

1 Inggris Aktif

DAERAH

1 Minahasa Aktif

IV. RIWAYAT TANDA JASA

- 1 SL. Kesetiaan VIII Th
- 2 SL. Seroja
- 3 SL. Kesetiaan XVI Th
- 4 SL. GOM Raksaka Dharma
- 5 SL. Dharma Nusa
- 6 SL. Kebaktian Sosial
- 7 SL. Wira Dharma (Perbatasan)
- 8 SL. PAM Puter
- 9 SL. Dwija Sistha

V. RIWAYAT PENUGASAN OPS. DALAM NEGERI

1 Ops.Tim-Tim	Th 1995
2 Ops.Tim-Tim	Th 1999
3 Ops. Irja	Th 2002
4 Ops. Aceh	Th 2004
5 Ops Sandha Papua	Th 2009
6 Ops. Intelstrat Setia	Th 2015
7 Ops. Pamtas Ri – Philipina	Th 2017
8 Ops. Intelstrat Wijaya	Th 2018

VI. RIWAYAT PENUGASAN OPS. LUAR NEGERI

MACAM TUGAS	NEGARA
1 Latma	Th 1997 Australia
2 Dik Intel	Th 2015 Inggris
3 Kerma Intel	Th 2016 Papua Nugini
4 Ops Intel	Th 2017 Philipina

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN

PANGKAT	TMT	KEP	PANGKAT	TMT	KEP
1 Letda	24-07-1993	Keppres/46/ABRI/1993	5 Letkol	01-10-2009	Kep/614/IX/2009
2 Lettu	01-10-1996	Skep/323/IX/1996	6 Kolonel	01-04-2015	Keppres No 08/TNI/2015
3 Kapten	01-10-1999	Skep/544/IX/1999	7 Brigjen TNI	12-10-2021	Keppres No 94/TNI/2021
4 Mayor	01-10-2004	Skep/308/IX/1999			

VIII. RIWAYAT JABATAN

JABATAN	TMT	JABATAN	TMT
1. Pama Pussenif	24-07-1993	17. Pabandya Min Intel Sintel Kopassus	13-11-2008
2. Pama Kopassus	01-04-1994	18. Pgs. Danyon-33 Grup-3 Kopassus	15-01-2010
3. Dan Unit-3/2/3/21/2/Kopassus	01-03-1996	19. Danyon-33 Grup-3 Kopassus	30-03-2010
4. Danton-1/2/22/2/ Kopassus	01-09-1996	20. Dandenma Kopassus	28-03-2011
5. Kasi Intel Yon-22/2/ Kopassus	01-09-1996	21. Dandim 1701/Jayapura Rem 172/PWY Dam XVII/Cen	15-08-2011
6. Kasi Ops Yon-23/2/ Kopassus	01-03-1997	22. Kasrem 172/PWY Dam XVII/Cen	07-09-2012
7. Danki-1 Yon-23/2/ Kopassus	01-09-1998	23. Dansat Kontra Intel Bais TNI	20-11-2014
8. Kaur Dik Bangpers Kopassus	01-02-2001	24. Paban Utama A-4 Dit A Bais TNI	12-11-2017
9. Kaur Sintel Kopassus	01-07-2001	25. Paban Utama A-3 Dit A Bais TNI	18-19-2019
10. Dantim-3 Yon-31 Grup-3 Kopassus	01-01-2002	26. Danrem 074/Wrt Dam IV/Diponegoro	08-06-2020
11. Pama Grup-3 (Diklapa) Kopassus	01-07-2003	27. Kabidjianbangstrabangkuatdaya Wilhanrat Sdirjianbang Seskoad	04-02-2021
12. Danden 3 Yon-31 Grup-3 Kopassus	01-10-2003	28. Danrem 052/Wijayakrama Kodam Jaya	13-09-2021
13. Kasi Ops Grup-3 Kopassus	01-04-2005	29. Wakapuspen TNI	29-08-2022
14. Dandenma Grup-3 Kopassus	01-07-2006	30. Kaskogartap 1/Jakarta	04-11-2022
15. Wadanyon-33 Grup-3 Kopassus	01-04-2007	31. Staf Khusus Kasad	29-03-2023
16. Pamen Kopassus	01-04-2008		



